



KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

AKSES PENDIDIKAN DASAR BAGI SEMUA ANAK INDONESIA

STRATEGI TATA KELOLA PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI WILAYAH DUKUNGAN KOMPAK

Maret 2021



AKSES PENDIDIKAN DASAR BAGI SEMUA ANAK INDONESIA

STRATEGI TATA KELOLA PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI WILAYAH DUKUNGAN KOMPAK

Maret 2021

Penulis:

Umbu Reku Raya

AKSES PENDIDIKAN DASAR BAGI SEMUA ANAK INDONESIA
Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah di Wilayah Dukungan Kompak

ISBN: 978-623-6080-21-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
©2021 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis:

Umbu Reku Raya

Tim Penyunting:

Nurman Siagian
Hardini Utami
Vindya Budiman
Ancilla Irwan

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi communication@kompak.or.id.

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id.

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kehendak-Nya Laporan Dokumentasi Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di empat kabupaten binaan KOMPAK telah selesai disusun. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas, KOMPAK, dan Unicef yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan ATS khususnya di daerah binaan.

Pendidikan adalah layanan publik yang semestinya dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia usia sekolah tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, dan kelompok ekonomi. Pendidikan juga merupakan hak dasar bagi semua warga negara, dan bukan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat. Karena itu, layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat bahkan yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terdepan sekalipun.

Pemerataan layanan pendidikan sudah relatif baik yang ditandai oleh angka partisipasi kasar (APK) yang relatif tinggi, terutama pada jenjang dasar yaitu: SD/MI 106,32%, SMP/MTs 92,06%, SMA/SMK/MA 84,53%, Pendidikan Tinggi 30,58% (Susenas 2020). Namun demikian, masih terdapat masalah penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak menempuh pendidikan di sekolah (ATS: Anak Tidak Sekolah), yang jumlahnya mencapai lebih dari 4 juta anak. Hal ini disebabkan tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal. Selain kondisi geografis, beberapa masalah perlu ditanggulangi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab ATS, antara lain, isu anak bekerja, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dan anak/remaja dalam pernikahan. Dengan demikian, diharapkan layanan pendidikan menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan tanggung jawab semua pihak sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Mitra pembangunan yang bergerak di sektor pendidikan e.g. KOMPAK terlibat dalam upaya mengatasi ATS di empat kabupaten melalui aneka skema program: (i) “Gerakan Kembali Bersekolah” di Brebes, (ii) “Gerakan Kudu Sekolah” di Pekalongan, (iii) “Gerakan Sapu Bersih Drop Out (SABER DO)” di Lombok Utara, dan (iv) “Kelas Perahu” di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Berbagai skema program tersebut merupakan bentuk inovasi lokal dalam upaya mengatasi masalah ATS sesuai konteks dan keunikan masing-masing daerah. Selain itu, KOMPAK juga membuat dokumentasi untuk memahami proses dan dinamika pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan, kendala, dan faktor pendukung keberhasilan implementasi program sebagai pembelajaran bersama. Di antara daerah sasaran yang dapat dijadikan contoh adalah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pangkep. Pengelola program di kedua kabupaten ini telah menunjukkan sinergi, kolaborasi, dan kerja kolektif antarpemangku kepentingan dalam menangani ATS dan mengatasi masalah serius yang berpengaruh besar pada kesuksesan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada KOMPAK atas inisiatif dan kerja sama yang telah dilakukan dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan ATS. Solusi dan strategi penanganan ATS berbasis kekuatan lokal yang dilakukan di empat kabupaten tersebut dapat menjadi referensi untuk replikasi di daerah lain dan menjadi masukan di tingkat nasional.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas



Amich Alhumami, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK	5
DAFTAR SINGKATAN	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
I. PENDAHULUAN	9
I.1. Latar Belakang	9
II. METODOLOGI	13
II.1. Metode Pengambilan Data	13
II.2. Pertanyaan Penelitian	15
II.3. Lokasi Pengambilan Data	15
II.4. Periode Pengambilan Data	16
III. ANAK TIDAK SEKOLAH DI INDONESIA	19
III.1 Definisi	19
III.2. Profil ATS di Indonesia	19
IV. INOVASI DALAM UPAYA PENANGANAN ATS	27
IV.1. Strategi Pencegahan dan Penanganan ATS	27
IV.1.1. Strategi Pencegahan ATS: Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep	27
IV.1.2. Strategi Penanganan ATS: Gerakan KUDU Sekolah, GKB, dan SABER DO	28
IV.2. Desain Program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS	29
IV.3. Bentuk Kelembagaan dari Inovasi Penanganan ATS	30
IV.4. Pelaksanaan Program Inovasi Penanganan ATS: Pendataan	30
V. CAPAIAN PROGRAM INOVASI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN ATS	33
V.1. Penguatan Tata Kelola Program Penanganan dan Pencegahan ATS	33
V.1.1. Peraturan Tata Kelola ATS	33
V.1.2 Anggaran	33
V.1.3. Kelembagaan Lintas Sektor	33
V.1.4. Sistem Pendataan	34
V.2. Penurunan Jumlah ATS	34
V.3. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Kinerja Inovasi	35

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
VI.1. Kesimpulan	39
VI.2. Rekomendasi	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	43
Lampiran 1. Persentase Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah Berdasarkan Kelompok Umur	43
Lampiran 2. Alasan Anak Menjadi ATS dan Perbedaan antar Gender	46
Lampiran 2.1. Alasan mengapa anak Indonesia menjadi ATS	46
Lampiran 2.2. Perbedaan alasan anak Indonesia menjadi ATS antar Gender	46
Lampiran 3. Capaian Penguatan Aspek Tata Kelola Penanganan ATS di Empat Kabupaten	47
Lampiran 3.1. Aspek Tata Kelola Penanganan ATS Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes	47
Lampiran 3.2. Aspek Tata Kelola Penanganan ATS Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan	48
Lampiran 3.3. Aspek Tata Kelola Penanganan ATS SABER DO di Kabupaten Lombok Utara	48
Lampiran 4. Aspek Tata Kelola Pencegahan ATS Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep	49

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Inovasi Lokal Penanganan ATS di Kabupaten KOMPAK	11
Tabel 2.	Narasumber Pendokumentasian	13
Tabel 3.	Daftar Narasumber	14
Tabel 4.	Persentase Anak yang Tidak Pernah Bersekolah dan <i>Drop Out</i> Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan 2019	20
Tabel 5.	Ragam Inisiator, <i>Roadmap</i> , Institusi Pemimpin, dan Penyebaran Inovasi	29
Tabel 6.	Capaian Pengembalian ATS ke Sistem Persekolahan Dibandingkan dengan Target dan Jumlah ATS Terdata	34
Tabel 7.	Capaian Kelas Perahu dalam Menahan Anak Rentan di Sistem Persekolahan	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Periode Pendokumentasian	16
Gambar 2.	Kerangka Kerja Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Inovasi Penanganan ATS di Empat Kabupaten	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	ATS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 1994–2020 (%)	20
Grafik 2.	Alasan ATS per Provinsi	21
Grafik 3.	Alasan Anak Perempuan Tidak Pernah Bersekolah (%)	21
Grafik 4.	Alasan Anak Laki-laki Tidak Pernah Bersekolah (%)	21
Grafik 5.	Alasan Anak Perempuan Putus Sekolah (<i>Drop Out</i> , %)	22
Grafik 6.	Alasan Anak Laki-laki Putus Sekolah (<i>Drop Out</i> , %)	22
Grafik 7.	Tingkat Bertahan dalam Bangku Sekolah	23
Grafik 8.	Tingkat Putus Sekolah Murid SD, SMP dan SMU (%)	24
Grafik 9.	Distribusi Alasan Utama Penyebab Anak Usia Sekolah Menjadi ATS di Kabupaten Pangkep	27

DAFTAR SINGKATAN

ATS	: Anak Tidak Sekolah
APM	: Angka Partisipasi Murni
APK	: Angka Partisipasi Kasar
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bapperlitbangda	: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDT	: Basis Data Terpadu
BOP	: Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
CBM	: Celoteh Brebes Membangun
DAPODIK	: Data Pokok Pendidikan
Dindik	: Dinas Pendidikan
DUDI	: Dunia Usaha Dunia Industri
EMIS	: <i>Education Management Information System</i> , Kementerian Agama
FMPP	: Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (di Kabupaten Brebes)
GKB	: Gerakan Kembali Bersekolah (inovasi penanganan ATS di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KUDU Sekolah	: Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (inovasi penanganan ATS di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah)
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (Lembaga Penyetaraan Pendidikan)
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SABER DO	: Sapu Bersih Droup Out (inovasi penanganan ATS di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat)
SD	: Sekolah Dasar
SIPBM	: Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	: United Nations Children's Fund
Verval	: Verifikasi dan Validasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi persoalan krusial dalam sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini diperburuk oleh pandemi COVID-19, di mana terjadi peningkatan jumlah ATS menjadi 4,4 juta anak (2020) yang disebabkan oleh penurunan pendapatan rumah tangga (Yarrow, Massod, dan Afkar, 2020). SUSENAS (2017) menunjukkan berbagai penyebab lain ATS yaitu kondisi disabilitas, jarak dari sekolah ke rumah, serta anak bekerja maupun membantu mengurus rumah.

Sejak tahun 2017, KOMPAK mendukung inisiatif pemerintah di 4 kabupaten untuk penguatan tata kelola program penanganan ATS. Kabupaten Brebes dengan Gerakan Kembali Bersekolah, Kabupaten Pekalongan dengan Gerakan KUDU Sekolah (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur), Kabupaten Lombok Utara dengan SABER DO (Provinsi Nusa Tenggara Barat), serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan Kelas Perahu (Provinsi Sulawesi Selatan). Empat inovasi tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu: (a) penanganan ATS yaitu KUDU Sekolah, GKB dan Saber DO; serta (b) pencegahan ATS yaitu Kelas Perahu.

Menjelang akhir masa program KOMPAK, dilakukanlah pendokumentasian terhadap ragam dukungan dan intervensi yang telah dilakukan untuk memahami proses implementasi dan capaian, identifikasi praktik baik dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*, FGD) dan wawancara terstruktur serta studi literatur. Keseluruhan analisis tersebut akan bermanfaat untuk optimalisasi desain inisiatif/program serupa, yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah atau mitra pembangunan lainnya. Secara khusus, pendokumentasian ini juga akan menjadi temuan lapangan untuk memperkaya Strategi Nasional dan Petunjuk Teknis ATS.

Inovasi penanganan ATS ditemukan berhasil dalam mengembalikan ATS ke sekolah, melebihi target yang dicanangkan. Sementara itu, strategi pencegahan ATS menjadi praktik baik pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang fleksibel bagi kelompok rentan putus sekolah. Desain model dengan pelembagaan berjenjang, dari tingkat kabupaten hingga desa, menjadi salah satu kunci keberhasilan. Kepemimpinan Bappeda, keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci peluasan sebaran dan cakupan, ketersediaan anggaran, dan keberlanjutan program. Selain itu, mekanisme pendataan yang sistematis dibutuhkan dalam memastikan ketepatan dan keberlanjutan inovasi – dimulai dari pendataan awal hingga pemantauan ATS yang sudah kembali sekolah.

Hasil analisis dari kajian ini kemudian memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Untuk dokumen strategi nasional, juknis atau panduan ATS di tingkat pusat dapat menampilkan contoh praktik baik strategi pencegahan dan penanganan ATS agar memberikan peta jalan untuk tata kelola penanganan ATS di level kabupaten. Penguatan dan harmonisasi kebijakan penting dalam penyediaan pendanaan program untuk menjamin keberlangsungan program. Di samping itu, untuk menekankan upaya penting dalam penanganan ATS adalah dengan menyediakan sistem manajemen data ATS berbasis teknologi sebagai upaya yang efektif, efisien, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data, terutama untuk anak penyandang disabilitas. Sistem manajemen data ATS tersebut mencakup proses pendataan awal, rekonfirmasi (pembaruan per tahun), dan monitoring ATS yang sudah kembali sekolah sampai menyelesaikan pendidikan sesuai jenjangnya (pembaruan per semester).

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

BANTUAN DANA "KUDU SEKOLAH"
OLEH BUPATI PEKALONGAN MELALUI BAZNAS
JENJANG SD

Rp. 400.000

AKSES PENDIDIKAN DASAR BAGI SEMUA ANAK INDONESIA

STRATEGI TATA KELOLA PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DI WILAYAH DUKUNGAN KOMPAK



PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kondisi dasar yang dibutuhkan dari pembangunan yang menysasar pengentasan kemiskinan. Upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia salah satunya diawali dari akses terhadap pendidikan dasar yang setara bagi semua. Pendidikan menjadi modalitas dalam mendorong kualitas tenaga kerja yang produktif, yang pada akhirnya diharapkan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam lapangan kerja, memperoleh upah yang layak, serta akhirnya berkesempatan untuk meningkatkan status sosial ekonomi.^{1,2}

Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kualitas hidup rakyatnya, termasuk melalui peningkatan akses layanan pendidikan dasar bagi semua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 menargetkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dari 55,3 persen (2014) menjadi 67,5 persen (2019).³ Hal ini dipertegas kembali dalam RPJMN 2020–2024 dengan target tingkat penyelesaian pendidikan sekolah dasar (SD) menjadi 94 persen (2024) dari 91,8 persen, dan penuntasan pendidikan menengah pertama menjadi 89,49 persen dari 81,7 persen.⁴ Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam aksi global capaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana pendidikan yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar seumur hidup bagi semua warga negara menjadi salah satu tujuannya (Target 4).

Pelaksanaan komitmen tersebut telah memperlihatkan hasil walaupun belum optimal. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa pada periode 2017–2019, persentase anak tidak sekolah (ATS) telah berkurang sebesar 6,3 persen. Bila ditelusuri lebih lanjut, SUSENAS tahun 2017–2019 menunjukkan ATS usia 7–12 tahun menurun 2,5 persen (setara 0,09 poin persentase), ATS usia 13–15 tahun menurun 8,95 persen (setara 0,45 poin persentase), dan ATS usia 16–18 tahun menurun 10,29 persen (setara 0,72 poin persentase). Secara total, per tahun 2019 masih tercatat 4,3 juta ATS di Indonesia, angka yang setara dengan populasi penduduk Provinsi Bali di tahun yang sama.

Faktor ekonomi dan konteks sosial masih menjadi kendala dalam upaya memastikan seluruh anak mengenyam pendidikan dasar. SUSENAS 2017 telah mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, baik dikarenakan ketiadaan biaya (28,5 persen) ataupun anak yang bekerja (20,6 persen). Konteks ekonomi semakin terlihat dengan semakin tingginya angka putus sekolah anak khususnya dari keluarga miskin dan tinggal di daerah pedesaan. Konteks sosial yang teridentifikasi dan menjadi kendala adalah persepsi bahwa pendidikan anak saat itu sudah cukup (8,4 persen), menikah dini (6,9 persen) dan anak dengan disabilitas (2 persen). Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, risiko anak perempuan untuk putus sekolah lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, proporsi ATS yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki, sedangkan proporsi ATS karena menikah lebih tinggi pada anak perempuan.

-
- 1 Haskins, R. (2013, May 13). Three simple rules poor teens should follow to join the middle class. <https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-should-follow-to-join-the-middle-class/>
 - 2 Ford Foundation & Prakarsa. (2015). Multidimensional Poverty Index Indonesia 2012-2014: Executive Summary. https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/IndonesiaMPI_12_15_ExecSum.pdf
 - 3 Lihat poin 5 pada RPJMN 2015–2019 tentang Sasaran Utama Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan melalui Pendidikan.
 - 4 Lihat Bab 4 pada RPJMN 2020–2024 tentang sasaran utama terpenuhinya layanan dasar, indikator nomor 23.

Disrupsi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 diduga akan memperburuk kualitas hidup manusia secara global. Pandemi COVID-19 memengaruhi kebiasaan hidup sehari-hari serta ketahanan ekonomi yang akhirnya memengaruhi pendapatan rumah tangga. Yarrow, Massod dan Afkar (2020) memperkirakan pendapatan rumah tangga di Indonesia akan berkurang sebesar 1,1 persen sehingga dapat meningkatkan angka putus sekolah sebesar 91.888 anak per Juli 2020. Analisis tersebut memperkirakan jumlah ATS di Indonesia dapat mencapai sekitar 4,4 juta anak.

Pemerintah pusat terus melakukan inovasi untuk mendorong pengentasan ATS dengan melihat proses, capaian, dan pembelajaran dari program dan inovasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020–2024 memaparkan beberapa upaya untuk menangani ATS termasuk melalui pelaksanaan program afirmasi yaitu:

1. Melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah.
2. Membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau berkebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
3. Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama.
4. Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
5. Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukenali anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.

Bappenas (2020) turut mendorong komitmen ini melalui penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS di Indonesia (Stranas ATS) guna, “memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia.” Stranas ATS ini menjabarkan kompleksitas upaya penanganan ATS di Indonesia di mana berbagai faktor memengaruhi kerentanan seorang anak untuk tidak bersekolah atau putus sekolah, khususnya dalam rentang usia 7–18 tahun. Nantinya, Stranas ini akan dilengkapi dengan “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stranas Penanganan ATS (Juknis Stranas ATS)” yang memuat tahapan kegiatan dan langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan Stranas ATS. Secara ringkas, Stranas dan Juknis ATS bertujuan untuk:

1. Membangun pemahaman tentang situasi ATS di Indonesia.
2. Memetakan tanggung jawab dan kewenangan lintas sektor untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dalam upaya penanganan ATS.
3. Memberikan acuan kerangka pikir strategi penanganan ATS dan panduan untuk pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan solusi penanganan ATS, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ditemukan di daerah masing-masing.
4. Membangun sistem dan menyiapkan kapasitas kelembagaan yang efektif untuk upaya pelaksanaan strategi penanganan ATS di tingkat nasional dan daerah (Bappenas, 2020).

KOMPAK sebagai salah satu fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target pengurangan tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. KOMPAK mendukung inisiatif pemerintah melalui sejumlah program termasuk untuk pemerataan akses terhadap layanan dasar di sektor pendidikan. Hingga tahun 2019, KOMPAK telah mendukung penguatan tata kelola penanganan ATS yang diinisiasi oleh pemerintah daerah yaitu di Kabupaten Brebes dan Pekalongan (Jawa Tengah), Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur), Kabupaten Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat, NTB), serta Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep, Sulawesi Selatan). Empat di antaranya secara khusus menangani ATS di usia 7–18 tahun.

1. Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah)
2. Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)
3. Sapu Bersih DO di Kabupaten Lombok Utara (NTB)
4. Layanan Pendidikan Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep (Sulawesi Selatan)

Menjelang akhir masa program KOMPAK, dibutuhkan suatu pendokumentasian terhadap ragam dukungan dan intervensi yang telah dilakukan, tidak hanya untuk mencatat capaian keberhasilan tetapi juga mendokumentasikan proses dan pembelajaran sebagai masukan untuk pemerintah dan mitra pembangunan dengan program tata kelola lainnya. Pendokumentasian dapat berfungsi sebagai sumbangsih langsung terhadap Stranas dan Juknis ATS, dengan penambahan analisis yang didasarkan dari hasil praktik di lapangan. Oleh karena itu, pendokumentasian proses strategi penanganan ATS dukungan KOMPAK di empat kabupaten dilaksanakan.

Tabel 1.
Inovasi Lokal Penanganan ATS di Kabupaten KOMPAK

Inovasi Lokal	Deskripsi Singkat
GKB, Brebes	Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) untuk mendorong anak putus sekolah mendapat layanan pendidikan melalui sekolah, pondok pesantren, dan PKBM.
Gerakan Kudu Sekolah, Pekalongan	Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah (KUDU) adalah inisiatif yang mengajak sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan antara lain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, legislatif, pemerintah desa/kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, sektor swasta (DUDI) serta masyarakat peduli pendidikan.
SABER DO, Lombok Utara	Sapu Bersih <i>Drop Out</i> (SABER DO) untuk mendorong anak putus sekolah mendapat layanan pendidikan melalui sekolah, pondok pesantren, dan PKBM.
Kelas Perahu, Pangkep	Kelas Perahu (KP) adalah sebuah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang pergi ke laut dengan perahu, yang digunakan sebagai tempat belajar dengan sistem belajar mandiri. Peserta didik dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media belajar utama.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 23 SAKUALA
NSS. 101190207023
P. Sakuala Desa Mattiro Bombang
Kec. Liukang Tupabbiring Utara Kab. Pangkep

II

METODOLOGI

II.1. Metode Pengambilan Data

Metode kualitatif dipilih dalam proses dokumentasi untuk menelusuri proses implementasi dari empat inovasi lokal penanganan ATS yang disertai dengan pemetaan peran dari para pelaku terkait. Dokumentasi ini juga berusaha untuk mengidentifikasi praktik baik beserta pembelajaran yang dapat dipetik untuk keberlanjutan inovasi tersebut ataupun inovasi serupa lainnya.

Pada tahap awal pendokumentasian diselenggarakan lokakarya dengan pelaku di tingkat pusat yaitu Bappenas dan Kemendikbud sebagai pihak yang pembuat kebijakan ATS, serta *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai mitra pembangunan yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam penanganan ATS. Lokakarya ini ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap kerangka dan instrumen pendokumentasian, untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas analisis.

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan dua metode yaitu diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*, FGD) dan wawancara terstruktur dengan narasumber utama. Data primer ini kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang mencakup regulasi dan kebijakan ATS baik di tingkat nasional ataupun daerah, dokumen-dokumen inovasi penanganan ATS yang didukung KOMPAK ataupun lainnya, beserta data nasional terkait pendidikan dasar.

Proses pemilihan narasumber utama menggunakan *snowball sampling* di mana Tim KOMPAK di provinsi terkait membantu mengidentifikasi narasumber yang sesuai dengan kriteria pendokumentasian. Secara umum, narasumber utama terbagi ke dalam kelompok (a) penyedia layanan (*supply side*) yaitu pembuat kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah, dan (b) penerima manfaat (*demand side*) layanan pendidikan yaitu orang tua dari ATS. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Narasumber Pendokumentasian

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan dan Desa
<ul style="list-style-type: none">Dinas PendidikanPihak swasta yang mendukung inovasi	<ul style="list-style-type: none">Bappeda BapperlitbangdaDinas PendidikanDinas KependudukanDinas SosialPerwakilan KemenagFMPP (Brebek)	<ul style="list-style-type: none">CamatKepala DesaKepala SekolahGuruOperator DapodikPKBMOrangtua ATS/siswa

Narasumber dalam dokumentasi berjumlah 92 orang, di mana 56 orang adalah laki-laki dan 36 orang perempuan. Pendokumentasian ini berkomitmen untuk mendapatkan data dari narasumber dengan keterwakilan jenis kelamin, namun hanya dapat dikelola untuk narasumber penerima manfaat. Dokumentalis sulit memilah narasumber penyedia layanan karena siapa yang menjabat dan bertanggung jawab terhadap inovasi penanganan ATS ditentukan oleh yang berwenang.

Keterwakilan keluarga dari anak dengan disabilitas juga terkendala untuk dipenuhi karena ketersediaan narasumber.

Tabel 3.

Daftar Narasumber

No.	Kategori	Tingkatan Wilayah	Jumlah		
			Perempuan	Laki-laki	Total
FGD					
1	Bappeda/Bapperlitbangda	Kabupaten	4	6	10
2	Dinas Pendidikan	Kabupaten	5	5	10
3	Dinas Pendidikan	Provinsi	0	2	2
4	Tim Penggerak PKK	Kabupaten	1	0	1
5	Dinas Kependudukan	Kabupaten	2	2	4
6	Dinas Sosial	Kabupaten	3	2	5
7	Perwakilan Kemenag	Kabupaten	2	2	4
8	Organisasi kemasyarakatan	Kabupaten dan Desa	2	6	8
9	Camat	Kecamatan	0	3	3
10	Kepala Desa	Desa	0	5	5
11	Guru Sekolah	Kecamatan	6	6	12
12	Operator DAPODIK	Kecamatan	4	4	8
13	PKBM	Desa	0	4	4
14	Pihak swasta	Provinsi	0	2	2
Wawancara					
1	KOMPAK DC	Kabupaten	1	1	2
2	KOMPAK Frontline	Provinsi	2	1	3
3	PKBM	Desa	0	2	2
4	Orang tua siswa/ATS	Desa	2	2	4
5	Dinas Pendidikan	Kabupaten	2	1	3
Total			36	56	92

Pendokumentasian berlangsung dalam masa pandemi COVID-19 sehingga beberapa penyesuaian dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Peneliti tidak dapat melakukan pengambilan data primer secara langsung ke lapangan karena adanya pembatasan perjalanan (*travel restriction*), sehingga pengambilan data primer harus dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, terdapat keterbatasan dalam upaya membangun *rapport* dengan narasumber, serta sangat tergantung dengan ketersediaan jaringan internet. Khusus untuk FGD, keterbatasan ini kemudian ditambah dengan tidak leluasnya moderator dalam memfasilitasi untuk memastikan keterlibatan narasumber secara aktif dan merata. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cukup baik karena adanya komitmen dari narasumber utama yang memang memerhatikan inovasi penanganan ATS, serta adanya kepercayaan narasumber terhadap KOMPAK, khususnya dari kategori pembuat kebijakan dan penyedia layanan.

II.2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian dari pendokumentasian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan inovasi penanganan ATS di setiap kabupaten tersebut?
 - Apakah aspek yang sama di antaranya, dan apakah perbedaannya?
 - Bagaimanakah program dan intervensi didesain (siapakah yang dilibatkan, proses yang terlaksana)?
 - Bagaimanakah profil ATS di masing-masing lokasi?
 - Apa yang menjadi tujuan dari inovasi ATS di masing-masing lokasi?
2. Apakah struktur kelembagaan telah disusun dengan tepat?
 - Apakah struktur kelembagaan tersebut berfungsi?
 - Bagaimana peran dari masing-masing aktor?
 - Apakah pelaksana program memiliki kapasitas yang mumpuni?
 - Bagaimana pembiayaan untuk program dialokasikan dan apakah memadai untuk mencapai target yang diharapkan?
3. Apakah pelaksanaan inovasi tersebut sesuai dengan harapan?
 - Apa yang sudah sesuai, dan apa yang perlu ditingkatkan?
4. Perubahan apa yang telah terjadi dan dapat diamati?
 - Sistem dan prosedur (regulasi, anggaran, mekanisme dan SOP)
 - Sumber daya manusia (aktor yang terlibat dan peningkatan kapasitas)
 - Perubahan lainnya yang diamati oleh narasumber
5. Apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian dari pelaksanaan inovasi tersebut — baik yang mendukung ataupun menghambat?
6. Bagaimanakah aspek inklusi gender dan sosial dipertimbangkan dan ditangani melalui program ini?
 - Apakah ada upaya khusus untuk ATS perempuan dan ATS dengan disabilitas?
 - Bagaimana hal ini dapat ditingkatkan?

II.3. Lokasi Pengambilan Data

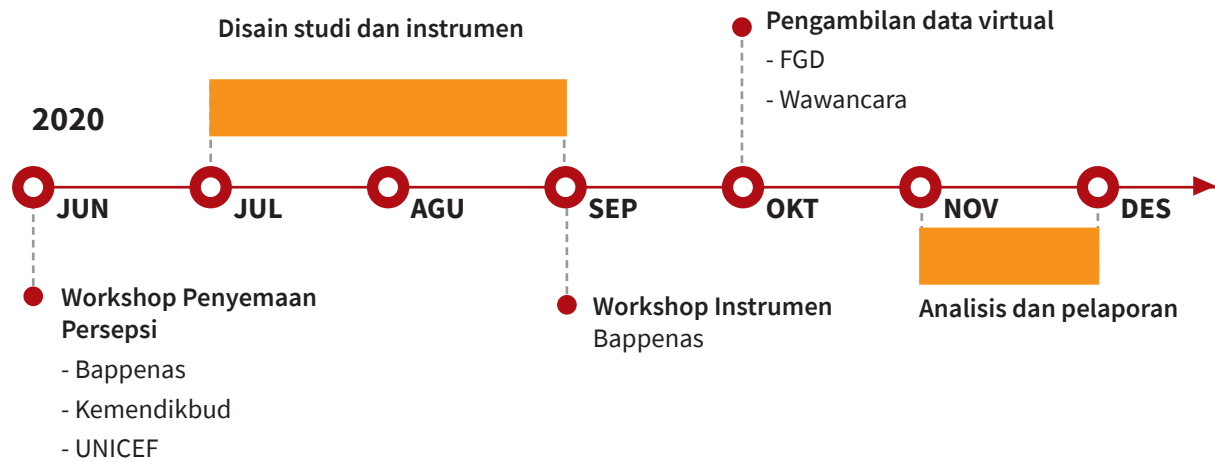
Pendokumentasian dilaksanakan di empat kabupaten yang menjadi wilayah kerja KOMPAK, di mana pemerintah kabupaten telah memiliki inisiatif untuk melaksanakan strategi khusus penanganan ATS dalam rentang usia 7–18 tahun, yaitu:

1. Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah) untuk Gerakan KUDU Sekolah;
2. Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) untuk Gerakan Kembali Bersekolah;
3. Kabupaten Lombok Utara (NTB) untuk Sapu Bersih DO; dan
4. Kabupaten Pangkep (Sulawesi Selatan) untuk layanan pendidikan Kelas Perahu.

II.4. Periode Pengambilan Data

Secara lebih detail jadwal pendokumentasian dapat dilihat di ilustrasi lini masa berikut ini.

Gambar 1.
Periode pendokumentasian







ANAK TIDAK SEKOLAH DI INDONESIA

Pendokumentasian ini diawali dengan mengidentifikasi beberapa hal dasar terkait ATS di Indonesia, untuk memahami definisi dan cakupan dari pendokumentasian ini serta memahami profil dari ATS ini.

III.1. Definisi

Di tingkatan internasional, definisi ATS mengacu pada definisi *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yaitu anak berusia 6–17 tahun dengan kondisi yaitu:

1. Tidak memiliki akses ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka.
2. Tidak terdaftar meskipun sekolah tersebut ada dan dekat.
3. Terdaftar tetapi tidak bersekolah atau tidak mampu untuk belajar ke sekolah dikarenakan diskriminasi berbasis jenis kelamin, kemiskinan, berpindah-pindah tempat, disabilitas, kelompok etnis minoritas, konflik, bencana alam, menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah keluarga, jarak sekolah yang jauh dan menempuh perjalanan berbahaya.

Di tingkat nasional ATS didefinisikan sebagaimana dijabarkan dalam Stranas ATS, yaitu anak berusia 7–18 tahun dengan kondisi berikut.

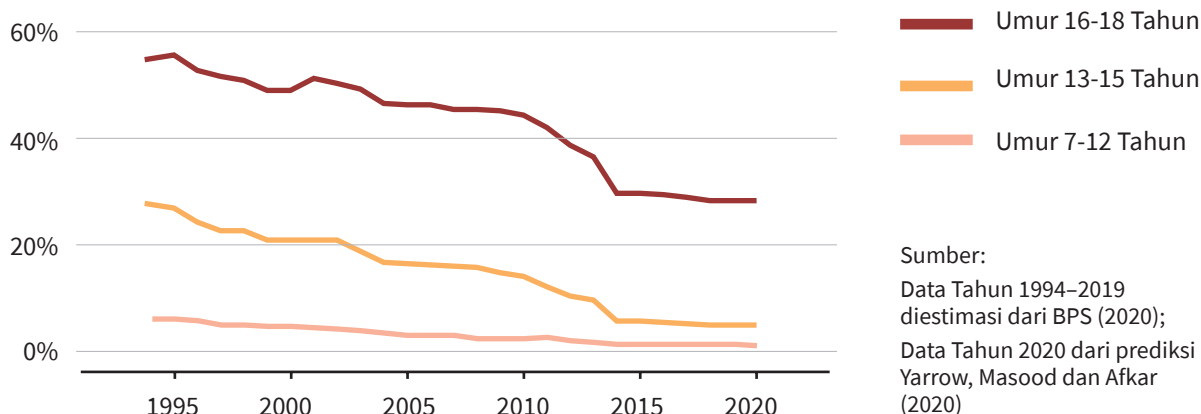
1. Tidak pernah sekolah ;
2. Putus sekolah pada jenjang tertentu; dan
3. Menyelesaikan jenjang tertentu tapi tidak melanjutkan dan sebab-sebab lain seperti kesulitan akses geografi, bencana alam, dan daerah konflik.

Kegiatan pendokumentasian ini kemudian menggunakan definisi ATS sesuai dengan dokumen Stranas ATS, agar mengacu pada konteks lokal serta selaras dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

III.2. Profil ATS di Indonesia

Persentase ATS di Indonesia cenderung menurun tetapi masih perlu intervensi lebih lanjut agar bisa tuntas. SUSENAS, sebagai salah satu pendataan ATS di Indonesia menunjukkan bahwa dalam dua tahun (2017–2019), persentase ATS berkurang sebesar 6,3 persen. Pemilahan berdasarkan kategori usia menunjukkan bahwa ATS berusia 7–12 tahun menurun 2,5 persen (setara 0,09 poin persentase), ATS berusia 13–15 tahun menurun 8,95 persen (setara 0,45 poin persentase), dan ATS berusia 16–18 tahun menurun 10,29 persen atau setara 0,72 poin persentase (SUSENAS, 2017–2019). Secara total, per tahun 2019 masih tercatat 4,3 juta ATS di Indonesia. Sebagai ilustrasi, angka ini setara dengan populasi penduduk di Provinsi Bali, sebagai pembanding untuk menekankan besarnya jumlah ATS. Ketika laporan ini dikembangkan, data SUSENAS 2020 belum keluar sehingga dokumentalis menggunakan data proyeksi yang dihitung oleh Yarrow, Massod, dan Afkar (2020). Mereka memperkirakan akan terdapat tambahan anak ATS sejumlah 91.188 per Juli 2020 karena pandemi COVID-19, sehingga proyeksi ATS dapat mencapai 4,4 juta orang anak.

Grafik 1.
ATS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 1994–2020 (%)



Dari 55,5 juta populasi anak berusia 7–18 tahun pada 2017, terdapat 0,63 persen anak belum pernah bersekolah dan 7,94 persen anak putus sekolah. Pada 2019 terjadi penurunan persentase kedua kategori ATS di mana terdapat 0,48 persen anak belum pernah bersekolah dan 7,71 persen anak putus sekolah. Baik pada 2017 dan 2019 persentase ATS tertinggi adalah pada kelompok umur 16–18 tahun (Tabel 4).

Tabel 4.
Persentase Anak yang Tidak Pernah Bersekolah dan *Drop Out* Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 dan 2019

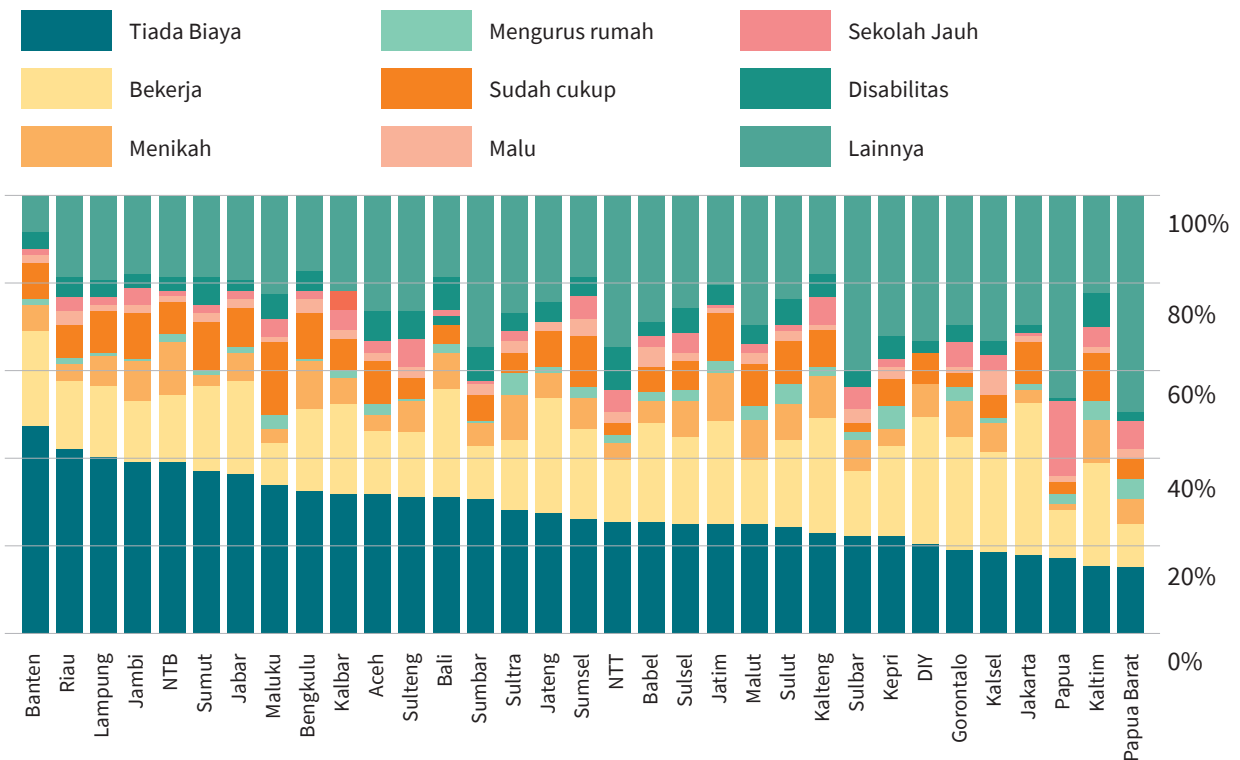
Kelompok Umur	Susenas 2019			Susenas 2017		
	Belum pernah bersekolah	<i>Drop Out</i>	ATS	Belum pernah bersekolah	<i>Drop Out</i>	ATS
7–12 tahun	0,49	0,27	0,76	0,68	0,18	0,86
13–15 tahun	0,38	4,11	4,49	0,53	4,39	4,92
16–18 tahun	0,58	27,06	27,64	0,64	27,92	28,56
Keseluruhan: 7–18 tahun	0,48	7,71	8,20	0,63	7,94	8,58

Sumber : Diolah dari Data Susenas 2017 dan Statistik Pendidikan Indonesia 2019 (BPS, 2019).

Catatan : Data keseluruhan (7–18 tahun) untuk tahun 2019 merupakan pembobotan berimbang menggunakan proporsi anak per kelompok umur tahun 2017. Statistik Pendidikan Indonesia 2019 tidak melaporkan persentase untuk keseluruhan anak 7–18 tahun.

Data SUSENAS 2017 menunjukkan faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, baik karena ketiadaan biaya (28,5 persen) ataupun anak yang bekerja (20,6 persen). Konteks sosial yang teridentifikasi menjadi kendala adalah persepsi bahwa pendidikan anak saat itu sudah cukup (8,4 persen), menikah dini (6,9 persen), dan anak dengan disabilitas (2 persen).

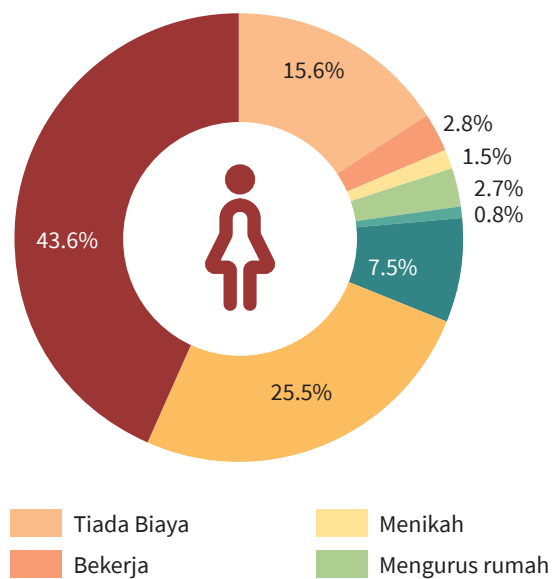
Grafik 2.
Alasan ATS per Provinsi



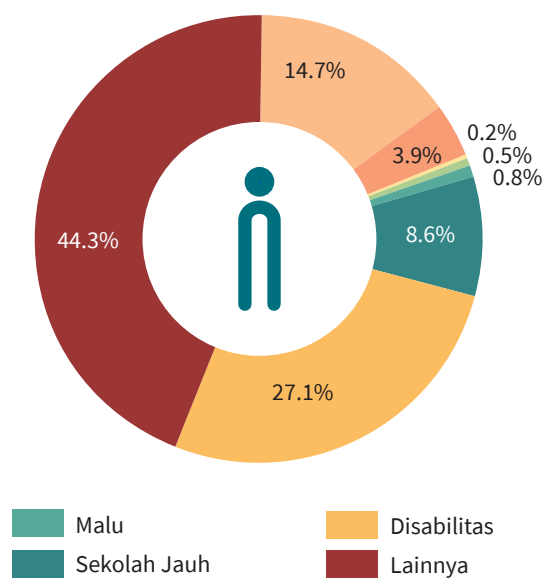
Sumber: Diolah dari Susenas 2017

Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, risiko anak perempuan untuk putus sekolah lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, proporsi ATS yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki, sementara proporsi ATS karena menikah lebih tinggi pada anak perempuan.

Grafik 3.
Alasan Anak Perempuan
Tidak Pernah Bersekolah (%)

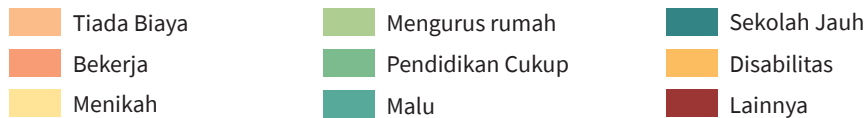
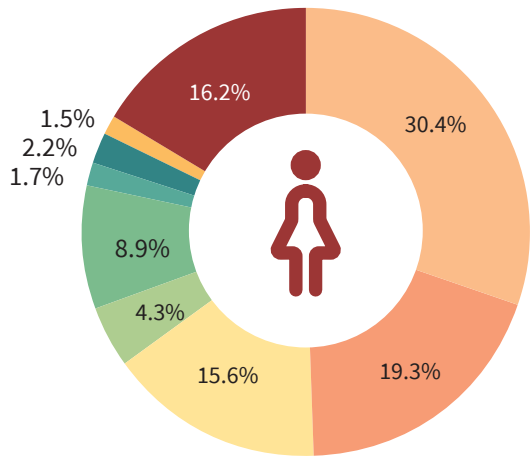


Grafik 4.
Alasan Anak Laki-laki
Tidak Pernah Bersekolah (%)



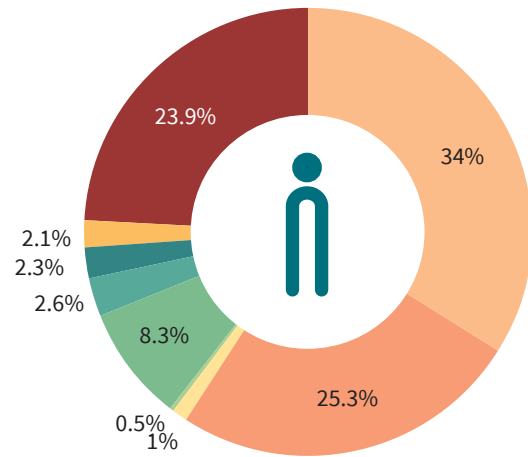
Sumber: Diolah dari Susenas 2017

Grafik 5.
Alasan Anak Perempuan
Putus Sekolah (*Drop Out*, %)



Sumber: Diolah dari Susenas 2017

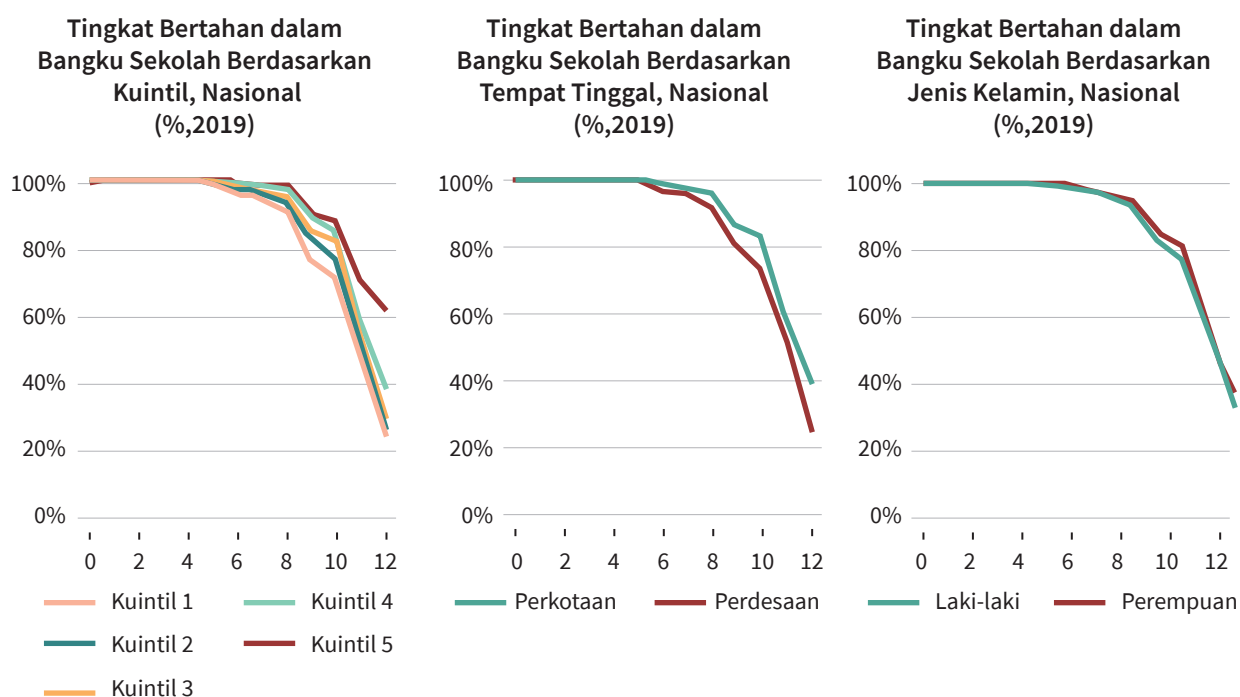
Grafik 6.
Alasan Anak Laki-laki
Putus Sekolah (*Drop Out*, %)



Analisis terhadap ATS juga menunjukkan bahwa Stranas perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Grafik 7 menunjukkan perbedaan alasan ATS antarwilayah misalnya alasan ATS terbesar di Provinsi Banten, Riau, Lampung, Jambi dan Nusa Tenggara Barat adalah ketiadaan biaya sekolah, sedangkan di Jakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah karena bekerja. Oleh karena ragam alasan tersebut kebutuhan detail intervensi akan berbeda.

Kuatnya pengaruh kondisi ekonomi terhadap kejadian anak putus sekolah tecermin dari lebih rendahnya tingkat keberlanjutan (*survival rate*) bersekolah pada anak dari keluarga miskin dan pedesaan tahun 2019.

Grafik 7.
Tingkat Bertahan dalam Bangku Sekolah

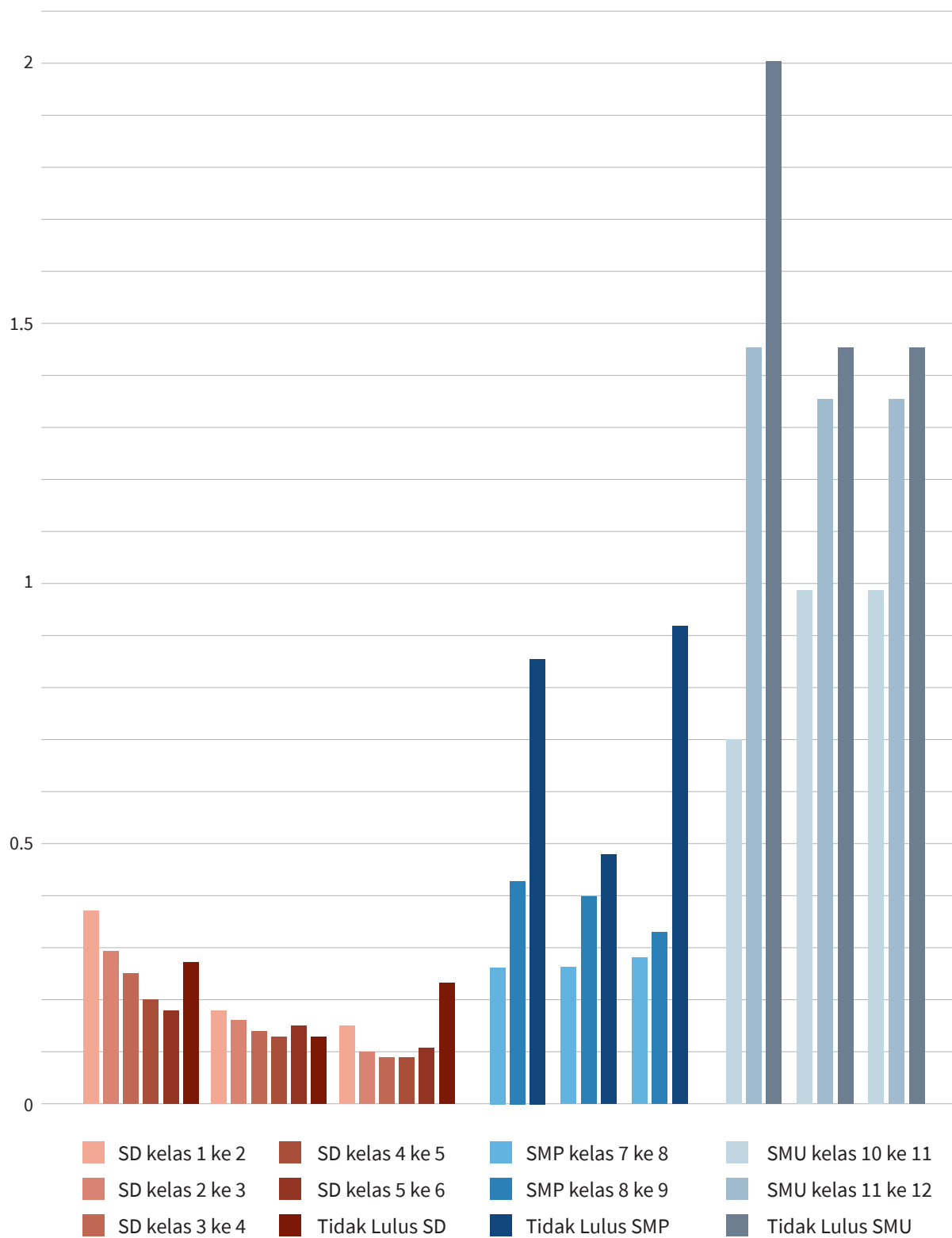


Sumber: Diolah dari Data SUSENAS (2019)

Kenaikan tingkatan sekolah pada anak turut memengaruhi aksesibilitas anak ke pendidikan. Untuk anak-anak yang pernah bersekolah, terdapat perbedaan angka anak yang terus melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seperti dari jenjang sekolah dasar (SD) ke sekolah menengah pertama (SMP), atau dari SMP ke sekolah menengah umum (SMU) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurut data Kemendibud (2019), untuk tahun ajaran 2018/2019, terdapat 17,81 persen anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Angka ini 137 kali lipat dari persentase anak yang putus sekolah ketika berada di SD yang hanya sebesar 0,13 persen dari total siswa. Untuk tahun ajaran 2018/2019, dari sekitar 25 juta siswa SD terdapat 0,13 persen siswa putus di jenjang SD, dan terus meningkat ke jenjang SMP yaitu 0,28 persen dan putus di jenjang SMU sebanyak 0,33 persen dan SMK 0,52 persen.

Untuk tahun ajaran 2016/2017, risiko putus sekolah tertinggi terjadi di tahun terakhir masing-masing jenjang pendidikan yakni di kelas 6, 9, dan 12. Hal itu dipengaruhi oleh jarak dari tempat tinggal siswa ke sekolah mereka di jenjang pendidikan lebih tinggi. Kejadian tersebut banyak terjadi di daerah pedesaan karena lokasi SMP dan SMU tidak selalu ada di desa, sehingga membutuhkan biaya transportasi atau akomodasi lebih banyak bahkan harus pindah domisili.

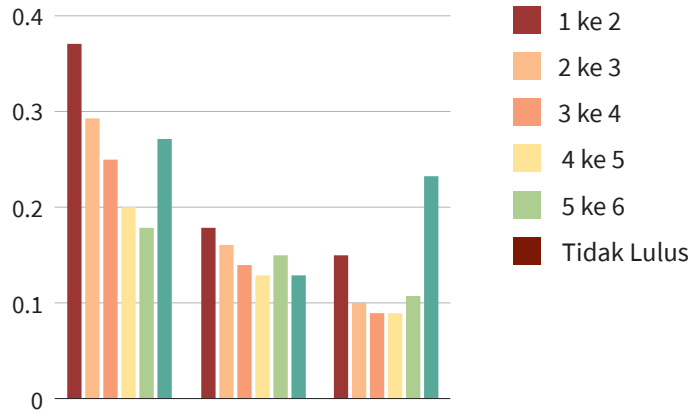
Grafik 8
Tingkat Putus Sekolah Murid SD, SMP dan SMU (%)



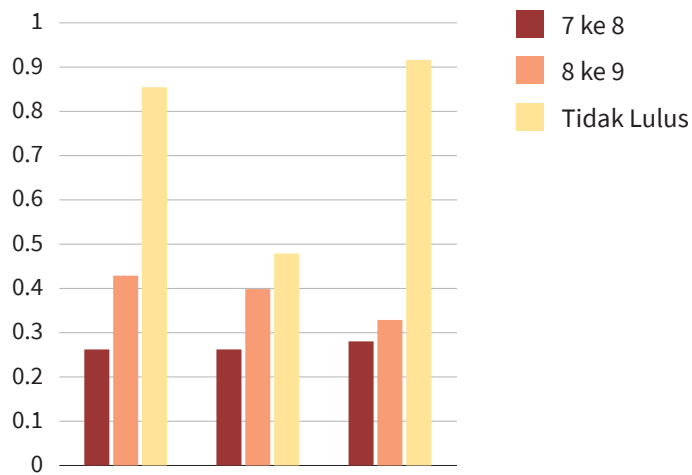
Sumber: Data Kemendikbud (2019)

Grafik 8
Tingkat Putus Sekolah Murid SD, SMP dan SMU (%)

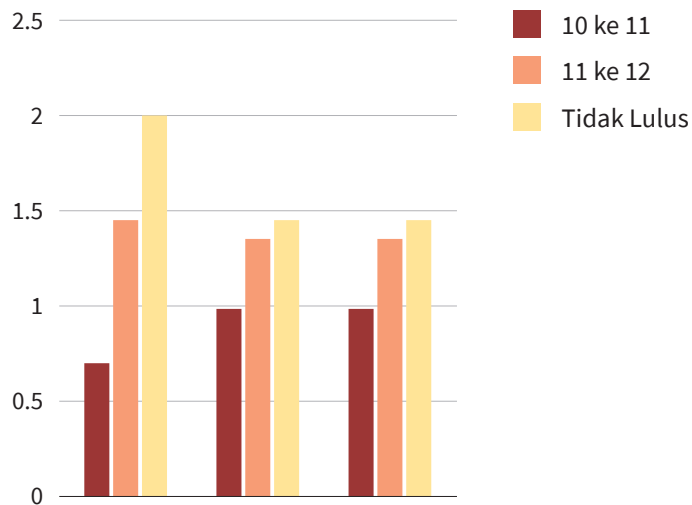
Tingkat Putus Sekolah Murid SD(%)



Tingkat Putus Sekolah Murid SMP(%)



Tingkat Putus Sekolah Murid SMU(%)



Sumber: Data Kemendikbud (2019)



IV

INOVASI DALAM UPAYA PENANGANAN ATS

Seperti dijelaskan dalam Tabel 1, berbagai upaya inovatif telah diimplementasikan untuk mengatasi isu anak tidak sekolah di beberapa wilayah. Bagian ini akan menguraikan strategi dan desain inovasi tersebut.

IV.1. Strategi Pencegahan dan Penanganan ATS

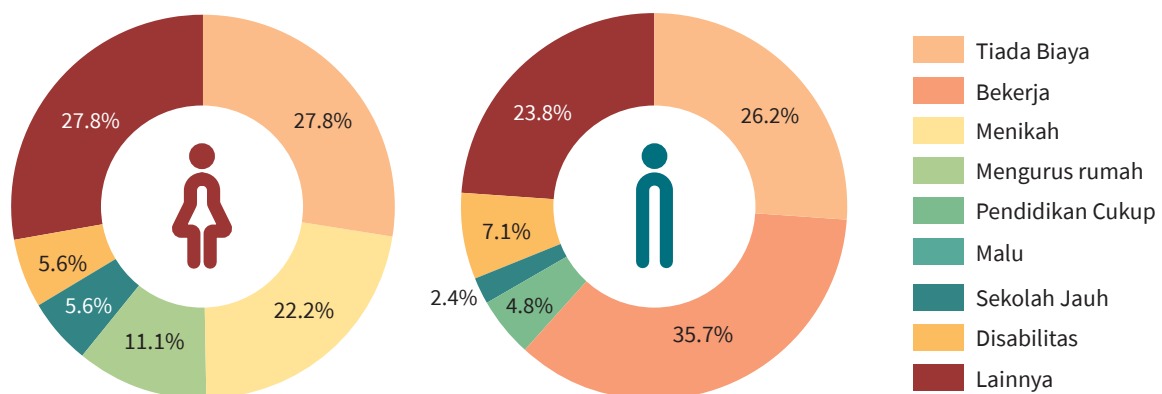
Strategi Nasional Penanganan ATS memandatkan dua strategi besar⁵ dalam penanganan ATS yaitu strategi pencegahan dan strategi penanganan. Berdasarkan hasil pemetaan, dua strategi dalam STRANAS ini dapat digambarkan dalam empat inisiatif lokal penanganan ATS di lokasi KOMPAK, yaitu Inovasi Kelas Perahu (Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep) sebagai strategi pencegahan, sedangkan Inovasi Gerakan Kembali Bersekolah (Kabupaten Brebes), Gerakan KUDU Sekolah (Kabupaten Pekalongan), dan SABER DO di Kabupaten Lombok Utara sebagai strategi penanganan.

IV.1.1. Strategi Pencegahan ATS: Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep

Anak usia sekolah di Kabupaten Pangkep memiliki kerentanan untuk putus sekolah karena mereka memiliki keharusan pergi ke laut (melaut) dan membantu orangtua, termasuk di jam sekolah. Data SUSENAS menunjukkan hampir 35,7 persen anak laki-laki dan 27,8 persen anak perempuan terpaksa putus sekolah karena memilih bekerja (Grafik 9). Narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep menuturkan bahwa “melaut” merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep, sehingga sejak remaja “melaut” menjadi kebiasaan bahkan suatu keharusan. Anak biasanya pergi ke laut dalam rentang waktu satu hari hingga tiga bulan. Oleh karena itu, jika sekolah tetap menerapkan aturan kaku dengan mengeluarkan anak yang membolos dan tidak bersekolah karena pergi ke laut, maka jumlah anak dengan status ATS akan meningkat. Penjelasan seorang guru sekolah dalam FGD menyatakan bahwa kecil kemungkinan bagi anak yang pergi “melaut” dan putus atau tidak sekolah akan kembali bersekolah, terutama bagi anak perempuan.

Grafik 9.

Distribusi Alasan Utama Penyebab Anak Usia Sekolah Menjadi ATS di Kabupaten Pangkep



Sumber: Diolah dari Data SUSENAS (2017)

5 Strategi Nasional Penanganan ATS hal. 23, Grafik 7.

Untuk merespons kondisi ini, pada 2017, salah satu inisiator program penanganan ATS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep menggagas dua sekolah percontohan dengan strategi pembelajaran fleksibel, yang disebut Kelas Perahu. Dalam Kelas Perahu, siswa tidak lagi terikat pada lokasi dan waktu belajar sekolah normal, tetapi diperbolehkan belajar dengan waktu dan tempat yang fleksibel, termasuk di atas perahu saat “melaut” bersama orang tua. Untuk itu, anak dibekali dengan lembar kerja siswa (LKS) yang disederhanakan sehingga dapat dilakukan secara mandiri selama “melaut”. Ketika telah selesai, anak dapat menyerahkan LKS tersebut kepada guru Kelas Perahu yang berada di desa yang sama di mana anak tinggal. Guru tersebut akan memeriksa LKS, kemudian melakukan kegiatan belajar mengajar secara singkat dengan metode diskusi. Jika anak telah selesai “melaut”, maka siswa dapat kembali bersekolah untuk mengikuti pembelajaran secara konvensional. Hal ini dimungkinkan karena secara administrasi siswa tersebut tetap terdaftar dalam data pokok pendidikan (DAPODIK). Fleksibilitas pembelajaran tersebut sejalan dengan prinsip *Flexible Learning Strategies* atau FLS (UNESCO, 2017), yakni program pendidikan alternatif yang diakui bermanfaat oleh UNESCO dalam menjangkau anak-anak dari kelompok marginal.

Namun, studi ini mengidentifikasi beberapa tambahan biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya, yaitu: (1) biaya imbalan tambahan kerja di luar sekolah bagi guru Kelas Perahu yang berkualitas; (2) biaya operasional untuk pengadaan LKS; (3) risiko penurunan kualitas pembelajaran karena seringnya anak belajar tanpa didampingi guru. Terlepas dari bertambahnya biaya yang dibutuhkan, strategi pencegahan tetap lebih efisien daripada strategi penanganan ATS untuk anak di luar sistem pendidikan yang membutuhkan proses pendataan yang masif dan relatif lebih mahal. Demikian pula secara kualitas pembelajaran, Kelas Perahu akan lebih baik daripada ATS yang dikembalikan ke sekolah melalui PKBM atau sekolah penyeteraan yang aktivitas belajar mengajarnya lebih rendah.

IV.1.2. Strategi Penanganan ATS: Gerakan KUDU Sekolah, GKB, dan SABER DO

Proses pengembalian ATS ke dalam sistem di sekolah membutuhkan strategi yang lebih kompleks dibandingkan pencegahan. Strategi penanganan ini memerlukan beberapa tahapan, seperti pendataan ATS secara komprehensif, konfirmasi kemauan ATS untuk kembali bersekolah, proses pengembalian ke dalam sistem persekolahan, maupun penyeteraan di PKBM, dan pemantauan siswa yang kembali bersekolah. Hal ini tentu berimplikasi pada dana dan waktu yang intensif. Begitupun dengan keterlibatan beragam aktor pemerintah dan nonpemerintah yang saling terkait, di antaranya Bappeda/Baperlitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, sekolah, serta organisasi massa (ormas) pemerhati pendidikan dan PKBM.

Implementasi strategi penanganan ATS telah dipraktikkan dalam tiga inovasi dukungan KOMPAK, yakni Gerakan KUDU Sekolah, Gerakan Kembali Bersekolah, dan SABER DO. Strategi penanganan ATS berupaya mengembalikan siswa ke dalam sistem pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang secara kualitas inferior dibandingkan sekolah formal. Sebuah studi tentang PKBM di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa PKBM minim sumber pendanaan, motivasi dan kompetensi pengelolanya rendah, PKBM belum bisa memanfaatkan alat keterampilan yang ada, program yang diselenggarakan belum optimal, belum ada kelanjutan program, kemampuan metode pembelajaran tutor masih kurang optimal, pemanfaatan media pembelajaran masih kurang, serta motivasi dan persentase kehadiran peserta didik rendah (Ekananto, 2014). Dari sisi peserta didik, siswa yang masuk ke PKBM melalui program penanganan ATS disebabkan umur ATS yang sudah tidak sesuai dengan usia sekolah formal terakhir yang diikutinya, dan terdapat preferensi ATS untuk tetap bekerja sambil bersekolah. Oleh karena itu, prinsip fleksibilitas menjadi penting untuk terus membuat anak bertahan di sekolah dan tidak kembali putus sekolah. Terkait hal ini, faktor psikologis seperti malu karena

lebih tua daripada teman sekelasnya dan faktor kognitif seperti sulitnya menyerap pelajaran di sekolah juga perlu menjadi pertimbangan khusus dalam implementasi strategi penanganan ATS.

IV.2. Desain Program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS

Implementasi inovasi penanganan ATS di empat kabupaten dukungan KOMPAK dapat dibedakan berdasarkan empat aspek, yaitu inisiator, ketersediaan dan pengembangan peta jalan, institusi pemimpin, dan cakupan implementasi program. Kelas Perahu dan GKB diinisiasi oleh ormas dan individu. Sedangkan, Gerakan KUDU Sekolah dan SABER DO diinisiasi oleh pemerintah daerah (Bappeda dan Dinas Pendidikan) dan memiliki peta jalan mulai dari perencanaan hingga pemantauan. Hal ini berimplikasi berbeda dalam proses berjalannya dan cakupan implementasi program.

Peta jalan membantu pelaku inovasi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan inovasi dengan lebih sistematis, sehingga program inovatif menjadi lebih efektif dan luas. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program Gerakan KUDU Sekolah dan Saber DO, di mana cakupan implementasi program dapat menjangkau sebagian bahkan seluruh kecamatan di kabupaten. Selain itu, keberadaan Bappeda dalam struktur tim utama penanganan ATS di level kabupaten memungkinkan adanya prioritas pengerjaan rancangan peraturan daerah (raperda), penganggaran penanganan ATS ke dalam APBD menjadi lebih cepat, serta kemudahan pengorganisasian komitmen lintas sektor. Dalam hal ini, Gerakan KUDU Sekolah mencerminkan dua hal tersebut yaitu memiliki peta jalan dan digerakkan secara langsung oleh Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Tim PKK. Hasilnya, program ini dalam waktu singkat dapat menjangkau hampir 151 desa dari 295 desa yang ada. Tabel 5 menguraikan variasi berbagai faktor yang dijelaskan di atas.

Tabel 5.

Ragam Inisiator, *Roadmap*, Institusi Pemimpin, dan Penyebaran Inovasi

Nama Inovasi	Inisiator	Pengembangan Peta Jalan	Institusi Pemimpin	Penyebaran Inovasi
GKB	Ormas (Celoteh Brebes Membangun/ FMPP) 2015	Tidak ada	FMPP (2015); Bappeda dan FMPP (2017)	Kuat: Penyebaran di 250 dari 297 desa dan kelurahan (84%)
Gerakan KUDU Sekolah	Bappeda 2019	Ada	Bappeda, Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK	Kuat: Penyebaran di 151 dari total 295 desa dan kelurahan (51%)
SABER DO	Dinas Pendidikan 2017	Ada	Dinas Pendidikan	Sedang: Penyebaran di seluruh kecamatan tetapi dengan sistem pendataan minimal
Kelas Perahu	Individu (Staf Dinas Pendidikan) 2017	Tidak ada	Dinas Pendidikan	Sedang: Penyebaran di 3 kecamatan

Sumber: Rangkuman hasil FGD dan tinjauan dokumen (2020)

IV.3. Bentuk Kelembagaan dari Inovasi Penanganan ATS

Keberadaan kelembagaan dari inovasi penanganan ATS beragam berdasarkan keterlibatan aktor dan model struktur di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Gerakan KUDU Sekolah, GKB, dan SABER DO mengimplementasikan model hierarki berjenjang mulai dari level kabupaten hingga desa. Di level kabupaten, Bappeda/Baperlitbangda adalah aktor utama yang berperan menjalankan fungsi koordinasi, sedangkan Dinas Pendidikan menangani teknis pelaksanaan. Selain aktor pemerintah, aktor nonpemerintah pun berperan penting dan dapat memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda dalam setiap bentuk inovasi penanganan ATS. Dalam beberapa praktik, aktor pemerintah dan nonpemerintah berkolaborasi dalam satu tim kerja, sehingga implementasi program berjalan dengan optimal.

Gerakan Kembali Bersekolah memiliki Satuan Kerja GKB (Satker GKB) dalam struktur kelembagaan pelaksana program yang merupakan gabungan antara organisasi pemerintah dan nonpemerintah (ormas). Satker berkedudukan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; termasuk di dalamnya adalah Bappeda/Bapperlitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, unsur pemerintah kecamatan dan desa, dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Selain itu, dalam forum ini terlibat pula komunitas Celoteh Brebes Membangun (CBM) sebagai inisiator awal GKB. Aktor nonpemerintah yakni FMPP terlihat memiliki peran yang kuat dalam proses advokasi agar ATS dapat bersekolah.

Dalam pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah, lembaga-lembaga nonpemerintah berbasis keagamaan yang memiliki program pendidikan seperti Pimpinan Muslimat Nahdatul Ulama (NU), Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah dan Ketua UMRI Kabupaten Pekalongan turut aktif terlibat dan berada dalam struktur kelembagaan. Hal ini dianggap perlu karena ketokohan mereka dapat mendorong penguatan keberhasilan program penanganan ATS. Selain itu, ada pula Forum CSR Kabupaten Pekalongan, yang dapat berkontribusi dalam pendanaan. Inovasi KUDU Sekolah juga melibatkan perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia di Kabupaten Pekalongan dalam struktur kelembagaan program, yang diharapkan dapat mendorong pengembangan dan pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Peran masing-masing aktor dalam struktur kelembagaan program inovasi ATS dapat terlihat dari tanggung jawab dan fungsi di tiap tahapan program, mulai dari proses penguatan regulasi, pendataan, monitoring, evaluasi dan pembiayaan ATS yang kembali ke sekolah serta evaluasi pascapengembalian ATS ke sekolah. Bappeda dan Dinas Pendidikan berperan dalam mengawal rancangan peraturan daerah (raperda) hingga disahkan menjadi peraturan Bupati tentang rintisan wajib belajar 12 tahun dan kerangka penanganan ATS, serta penyusunan struktur kelembagaan pelaksanaan program. Dalam hal ini, peran KOMPAK adalah dengan memberikan pendampingan teknis melalui penempatan tenaga ahli dalam proses pengembangan regulasi hingga penganggaran

IV.4. Pelaksanaan Program Inovasi Penanganan ATS: Pendataan

Pengumpulan data ATS adalah proses yang dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten, khususnya dalam program KUDU Sekolah dan GKB. Akan tetapi, variasi dalam proses pendataan ini bergantung pada profil aktor penggagas program, ketersediaan sistem dan basis data yang digunakan, serta sumber pendanaan untuk pendataan.

Sistem pendataan jumlah ATS dipilah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Brebes, itu semua terdapat dalam Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang dipromosikan oleh UNICEF bersama pemerintah daerah. Bahkan, pada pendataan terakhir anggaran desa telah menjadi sumber pendanaan. Profil ATS per desa, per kecamatan, dan agregat kabupaten berdasarkan jenis kelaminnya dapat ditampilkan dan diakses dalam *dashboard* SIPBM Kabupaten Brebes. Data ATS berdasarkan nama dan alamat tinggal juga tersedia di level desa dan digunakan untuk

keperluan perencanaan mikro pengembalian ATS ke sistem pendidikan. Untuk keperluan konfirmasi kemauan ATS kembali bersekolah, dengan dukungan KOMPAK, data SIPBM tersebut dijadikan *input* ke dalam proses rekonfirmasi data ATS tadi melalui aplikasi *ODK Collect & Aggregate*. Fitur tambahan ini sudah diujicobakan di lima kecamatan di Brebes, yakni Bantarkawung, Paguyangan, Wanasari, Kersana dan Larangan. Adapun sumber dana untuk uji coba fitur tersebut berasal dari APBD Kabupaten.

Berbeda dengan Kabupaten Brebes yang telah memiliki basis data terdesentralisasi di server desa, data Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan tersentralisasi di Bappeda. Meskipun demikian, data ATS berbasis nama dan alamat tinggal dapat dengan mudah dibagikan ke masing-masing kecamatan dan desa. Sentralisasi data ini cocok dengan struktur kelembagaan gerakan penanganan ATS KUDU Sekolah yang memang lebih digerakkan oleh pemerintah daerah. Dari pengalaman Gerakan KUDU Sekolah, diperlukan waktu satu tahun untuk melakukan desain dan implementasi sensus ATS ke seluruh desa menggunakan aplikasi KUDU Sekolah yang berbasis *android* dan *web*. Hasilnya kemudian dipergunakan untuk konfirmasi sampai tahap pemantauan dan evaluasi pada tahun ajaran berikutnya.

Pendataan ATS tahun 2017 dilaksanakan secara sukarela oleh gugus depan pramuka di Kabupaten Lombok. Pendataan ini menggunakan prinsip pendataan sebaya karena anak-anak pramuka dan ATS berada dalam kategori usia yang sama. Pendataan dilakukan secara manual yang kemudian dikompilasi oleh Dinas Pendidikan. Untuk membangun sistem pendataan yang kuat, pada akhir 2019 KOMPAK telah melaksanakan pelatihan untuk pengumpulan data ATS secara elektronik. Akan tetapi sampai Oktober 2020 belum juga terbangun sistem pendataan yang setara dengan basis data GKB di Brebes ataupun Gerakan KUDU Sekolah.

Oleh karena siswa Kelas Perahu secara administrasi masih melekat ke DAPODIK, maka memang tidak dibutuhkan sistem pendataan di luar DAPODIK. Hanya saja tetap diperlukan informasi tambahan untuk memahami kerentanan siswa. Untuk itu, dalam Panduan Replikasi Kelas Perahu telah disepakati instrumen untuk pemantauan bersama multisektor Kelas Perahu, termasuk untuk mendata siswa “melaut” dengan terpilah gender. Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep juga sedang menyiapkan strategi mirip Kelas Perahu untuk pencegahan ATS bagi anak-anak petani di pengunungan yang rentan putus sekolah karena harus bertani di jam sekolah.



V

CAPAIAN PROGRAM INOVASI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN ATS

Capaian program inovasi penanganan dan pencegahan ATS dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu penguatan tata kelola program penanganan ATS dan secara kuantitatif dari penurunan jumlah ATS.

V.1. Penguatan Tata Kelola Program Penanganan dan Pencegahan ATS

Meskipun praktik inovasi lokal penanganan ATS baru berjalan selama empat tahun, aspek tata kelola penanganan dan pencegahan ATS telah menjadi prioritas pembangunan dalam sektor pendidikan di empat kabupaten dukungan KOMPAK. Dalam hal ini aspek tata kelola dilihat dari empat komponen, sebagai berikut:

V.1.1. Peraturan Tata Kelola ATS

Di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan peraturan Bupati disahkan untuk rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun. Rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun ini diperlukan agar pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk penanganan ATS berusia SD sampai SMU. Selain itu, di Kabupaten Pekalongan telah disahkan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Sekolah Inklusif untuk menjangkau anak disabilitas yang rentan putus sekolah. Sementara di Kabupaten Pangkep, peraturan Bupati tentang layanan pendidikan Kelas Perahu melandasi implementasi program Kelas Perahu.

Dari hal di atas, dukungan KOMPAK pada aspek regulasi dan anggaran terhadap inovasi Kelas Perahu, Gerakan KUDU Sekolah (GKB) menghasilkan peraturan Bupati yang menjadi payung hukum bagi implementasi, penganggaran, dan alokasi sumber daya. Hal tersebut menunjukkan lingkungan regulasi yang kondusif untuk pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan. Regulasi dan anggaran tersebut ditunjang dengan adanya panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan inovasi di tiga kabupaten tersebut, yang disusun bersama pemerintah daerah dan KOMPAK.

V.1.2. Anggaran

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan di masing-masing kabupaten digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk mekanisme pendataan ATS, pelatihan tim fasilitator/guru untuk replikasi, serta bantuan langsung tunai dan paket peralatan sekolah untuk meringankan beban finansial orang tua dari ATS yang bersekolah kembali. Dalam praktiknya, sumber anggaran utama berasal dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas diperlukan agar pelaksana inovasi dapat mengakses sumber pendanaan lain, seperti dana perusahaan swasta melalui alokasi *corporate social responsibility* (CSR).

V.1.3. Kelembagaan Lintas Sektor

Implementasi strategi pencegahan dan penanganan ATS telah melibatkan kelembagaan lintas sektor yang diprakarsai oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan. Hal ini memunculkan antusiasme aktor-aktor kunci nonpemerintah lain, termasuk ormas pendidikan dan institusi PKBM untuk memperkuat tata kelola penanganan ATS.

V.1.4. Sistem Pendataan

Salah satu pembelajaran penting dalam tata kelola implementasi strategi penanganan dan pencegahan ATS adalah terbentuknya sistem pendataan yang sistematis. Sistem pendataan itu mencakup verifikasi data ATS dari data yang tersedia di kabupaten, melakukan konfirmasi kemauan ATS kembali ke sistem persekolahan, serta monitoring bertahannya ATS setelah kembali ke sekolah. Sistem pendataan yang lebih komprehensif, termasuk pemantauan, melibatkan pemerintah desa dan kecamatan agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.

V.2. Penurunan Jumlah ATS

Dalam dua tahun ajaran, inovasi penanganan ATS mulai memperlihatkan hasil dalam upaya menurunkan jumlah ATS. Tiga inovasi penanganan ATS, yaitu Gerakan Kembali Bersekolah, Gerakan KUDU Sekolah, dan SABER DO memperlihatkan capaian pengembalian ATS yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pengembalian ATS Kemendikbud tahun 2017. Secara terperinci, tiga inovasi tersebut berhasil mengembalikan ATS ke dalam sistem persekolahan berturut-turut sebanyak 6,2 kali; 2,2 kali; dan 1,3 kali lebih tinggi daripada target Kemendikbud. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya kepemilikan (*ownership*) program untuk upaya inovasi lokal penanganan dan pencegahan ATS, sebagai komplementer dari program pemerintah pusat.

Gerakan KUDU Sekolah dan GKB telah memperlihatkan kinerja pengembalian ATS ke sistem persekolahan yang sesuai dengan target tahunan, seperti yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten. Hal ini mencerminkan pula penganggaran yang tepat sasaran. Meskipun, di Kabupaten Brebes pada tahun pertamanya terjadi *overestimate* target sasaran karena tingginya keyakinan akan antusiasme ATS untuk kembali ke sekolah, sehingga Pemkab Brebes menganggarkan Rp5,7 miliar untuk pengembalian ATS ke sekolah. Akan tetapi setelah proses konfirmasi diketahui bahwa kemauan ATS untuk kembali bersekolah jauh di bawah target. Akibatnya, sebagian anggaran penanganan ATS tidak dapat diserap. Pemerintah Kabupaten Brebes kemudian memperbaiki sistem konfirmasi kesediaan ATS kembali bersekolah dan juga memperbaiki targetnya, sehingga pencapaiannya lebih realistis pada tahun berikutnya.

Tabel 6.

Capaian Pengembalian ATS ke Sistem Persekolahan Dibandingkan dengan Target dan Jumlah ATS Terdata

Nama inovasi	Target Pendataan ATS Kemendikbud 2017	Σ ATS Kembali Bersekolah (2 tahun ajaran)	Target Pemerintah Daerah	Σ ATS Data Kabupaten	Σ ATS SUSENAS 2017
GKB	850	5.285 (6,2 kali target Kemendikbud)	88% (target Pemda= 6.000)	30% (N: 17.420)	10% (N: 51.081)
Gerakan KUDU Sekolah	450	989 (2,2 kali target Kemendikbud)	101% (target Pemda= 980)	28% (N: 3.494)	4% (N: 26.258)
SABER DO	670	878 (1,3 kali target Kemendikbud)	Tidak diperoleh informasi	75% (N: 1.177)	20% (N: 4.300)

Sumber: Hasil analisis dari presentasi oleh Bappeda/Bapperlitbangda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, Pekalongan, dan Lombok Utara dalam FGD 14, 15, dan 22 Oktober 2020; Dokumen Juknis Kemendikbud, 2017; SUSENAS 2017

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa masih diperlukan perbaikan sistem pendataan. Hal ini terefleksi dari perbedaan data yang bergantung sumber basis datanya. Persentase capaian keseluruhan dapat berbeda bergantung basis data yang digunakan, yang mengindikasikan *under-counting* jumlah ATS. Jumlah ATS yang terdata oleh pemerintah daerah lebih rendah dibandingkan data yang berasal dari SUSENAS 2017.

Tabel 7.

Capaian Kelas Perahu dalam Menahan Anak Rentan di Sistem Persekolahan

Jenjang Pendidikan	Σ Pelajar				Pelajar Melaut (Kelas Perahu) (Σ dan %)			
	2016–2017	2017–2018	2018–2019	2019–2020	2016–2017	2017–2018	2018–2019	2019–2020
SD	1.682	1.665	2019	1.678	93 (5,5%)	102 (6,1%)	31 (1,8%)	29 (1,7%)
SMP	621	634	694	652	86 (13,8%)	75 (11,8%)	15 (2,2%)	14 (2,1%)
Jumlah	2.303	2.299	2.384	2.330	179 (7,8%)	177 (7,7%)	46 (1,9%)	43 (1,8%)

Sumber: Hasil analisis dari presentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam FGD 23 Oktober 2020

Sesuai dengan tujuannya, strategi pencegahan ATS melalui inovasi Kelas Perahu berhasil menahan anak rentan ATS di dalam sistem persekolahan formal. Data tahun ajaran 2016/17 dan 2017/18 menunjukkan bahwa program ini berhasil menahan 7,7 persen dan 7,8 persen siswa yang “melaut” dari putus sekolah (Tabel 7). Pada tahun ke-3, Kelas Perahu berhasil mendorong perubahan perilaku orang tua dan siswa sehingga di tahun ajaran berikutnya, jumlah siswa SD dan SMP yang “melaut” di jam sekolah berkurang menjadi 1,8–1,9 persen.

V.3. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Kinerja Inovasi

Dari capaian hasil tersebut, studi ini pun mendokumentasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerja inovasi di empat kabupaten dukungan KOMPAK, sebagai berikut:

1. Intervensi pada akar masalah

Keberadaan inovasi lokal mendorong masuknya pencegahan dan penanganan ATS ke dalam prioritas pembangunan pendidikan di empat wilayah tersebut. Oleh karena itu, secara konteks politis, telah dilakukan perubahan prioritas berdasarkan akar masalah yang teridentifikasi. Prioritas yang kuat terlihat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan di mana keterlibatan multiaktornya terlihat kuat. Hal ini juga terlihat dari inovasi Kelas Perahu, yang berorientasi pada pemecahan masalah sesuai dengan konteks lokal. Baik dari sisi *supply* dan *demand*, empat program inovasi penanganan dan pencegahan ATS telah mampu secara efektif menasar akar masalah ATS.

a. Sisi penyedia (*supply*)

Strategi pencegahan ATS menekankan pada ketersediaan sistem pembelajaran yang fleksibel yang memungkinkan siswa tetap belajar di luar waktu dan ruang kelas. Meskipun hal ini menimbulkan berbagai biaya tambahan, seperti biaya pembuatan lembar kerja siswa

yang sederhana, pelatihan guru Kelas Perahu, insentif untuk guru Kelas Perahu, dan risiko berkurangnya kualitas pembelajaran karena siswa tidak selalu didampingi guru dalam proses pembelajarannya. Sementara untuk strategi penanganan ATS menekankan pada sistem pembelajaran yang akomodatif terhadap kondisi ATS termasuk ATS yang bekerja (melalui PKBM) dan ATS dengan disabilitas (melalui sekolah inklusi).

b. Sisi permintaan (*demand*)

Adanya intervensi terhadap hambatan psikologis anak melalui advokasi terhadap anak dan orangtua (keluarga), serta intervensi secara finansial melalui bantuan langsung tunai dan perangkat sekolah untuk ATS yang kembali bersekolah.

2. Intervensi pada tata kelola program:

Inovasi lokal penanganan dan pencegahan ATS sudah ada yang berfokus pada perbaikan tata kelola, sehingga berimplikasi pada kualitas program, di antaranya:

- a. Adanya penguatan regulasi di level kabupaten tentang penuntasan pendidikan 12 tahun dengan harmonisasi program antara kabupaten dengan provinsi untuk jenjang SMU dan SMK.
- b. Adanya kelembagaan program penanganan ATS yang dipimpin langsung oleh Bappeda untuk koordinasi kebijakan, dan Dinas Pendidikan untuk teknis pelaksanaan, seperti pendataan, proses pengembalian ATS ke sekolah, pemantauan, dan pelaporan.
- c. Tersedianya anggaran yang bersumber dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, yang diperkaya oleh CSR dan sumber-sumber dana lain.
- d. Tersedianya sistem pendataan yang komprehensif dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan penanganan ATS.
- e. Tersedianya mekanisme dan prosedur penanganan ATS yang terdokumentasi, dengan cakupan mulai dari desain hingga pemantauan dan evaluasi keberhasilan inovasi.
- f. Adanya regulasi pendukung lainnya: Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Dana Desa, terutama yang secara spesifik mengatur urusan pendataan dan penanganan ATS.

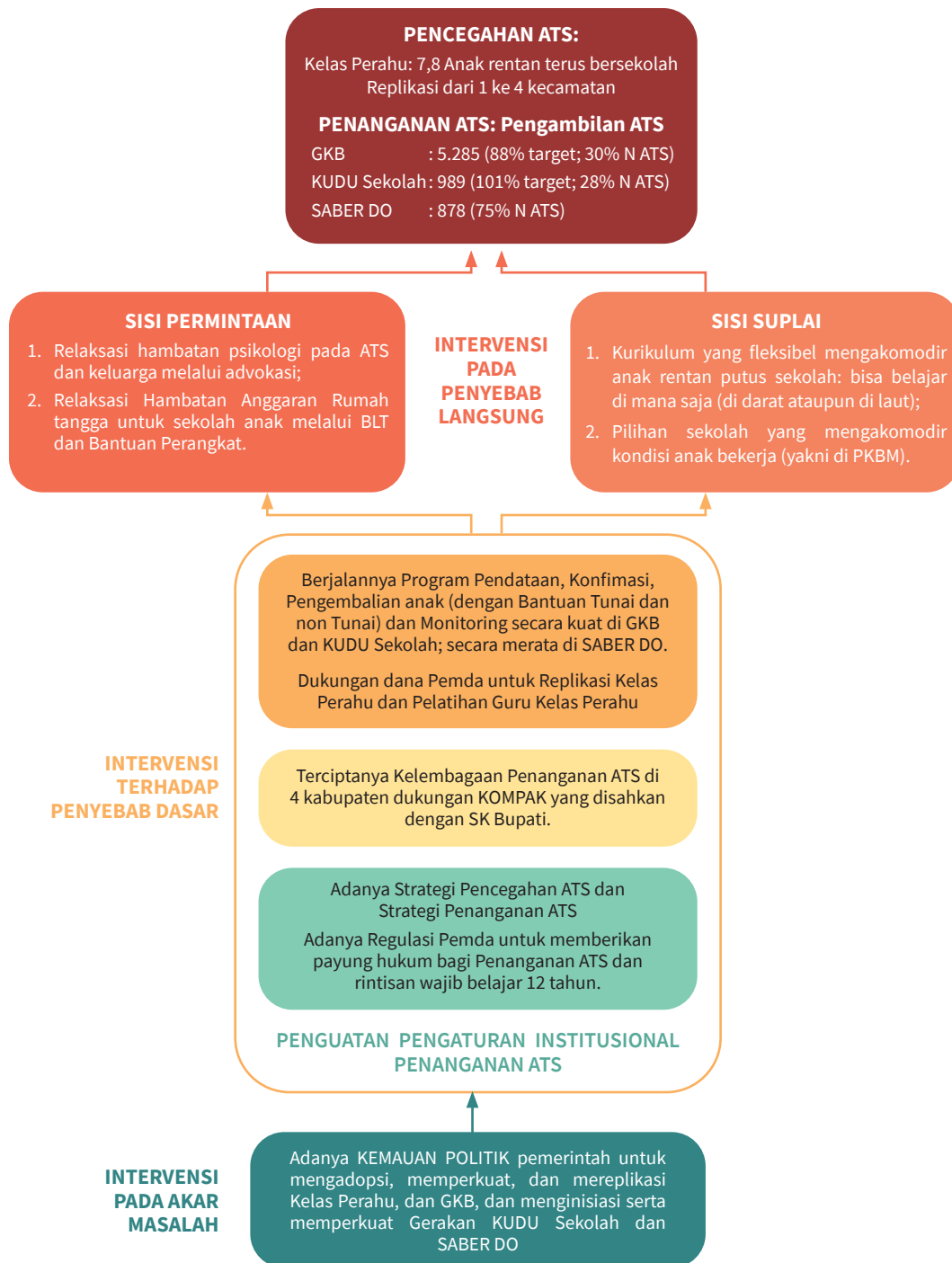
3. Faktor- faktor penghambat

Meskipun program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS telah menunjukkan hasil yang diharapkan, teridentifikasi pula beberapa faktor penghambat inovasi program di empat kabupaten dukungan KOMPAK, yaitu:

- a. Faktor eksternal, seperti gempa bumi Lombok 2018 yang mengharuskan pemerintah daerah memfokuskan anggaran dan sumber daya untuk urusan penanggulangan bencana daripada urusan lain.
- b. Kurangnya koordinasi lintas sektor karena adanya pandemi COVID-19.
- c. Masih belum harmonisnya regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten terkait wajib belajar 12 tahun, sehingga penanganan ATS untuk usia SMU menjadi terkendala oleh regulasi dan anggaran.
- d. Untuk anak disabilitas tidak sekolah (ADTS), ditemukan kendala sisi suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, teridentifikasi masih lemahnya regulasi terkait berbagai hal, misalnya perekrutan guru, investasi sarana fisik untuk sekolah inklusi dalam melayani anak disabilitas

tidak sekolah yang mayoritas belum pernah bersekolah. Sementara itu, dari sisi permintaan, ditemukan adanya hambatan psikologis pada anak dan orang tua khususnya untuk anak yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusi. Hal itu terjadi karena mayoritas ADTS belum pernah bersekolah sekalipun telah berusia remaja.

Gambar 2.
Kerangka Kerja Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Inovasi Penanganan ATS di Empat Kabupaten



Sumber: Hasil analisis, 2021



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1. Kesimpulan

Pada dasarnya pencegahan dan penanganan ATS dapat dilihat sebagai program yang secara langsung menangani isu kerentanan dan menysasar kelompok rentan. Hal ini menekankan pentingnya desain dan pelaksanaan program yang sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan sasaran, khususnya ATS dan keluarganya. Dalam pendokumentasian ini ditemukan beberapa praktik yang dilakukan untuk memastikan keseluruhan proses yang inklusif, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan, dengan beberapa catatan untuk perbaikan ke depan.

Dalam proses pengembangan desain inovasi, keterlibatan para pembuat kebijakan ataupun inovator/penggagas perempuan di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pangkep teridentifikasi menjadi salah satu upaya untuk memastikan adanya perspektif gender yang berimbang. Peran kuat tokoh perempuan dalam gerakan dan pengembangan kompetensi utama dari inovasi tata kelola ATS di tiga kabupaten tersebut, tentunya akan memperkuat upaya pengembangan dan pelaksanaan program yang sensitif gender, yang secara sistematis membawa perspektif dan pengalaman dari para perempuan ini dalam pengelolaan program. Lebih jauh, kesempatan yang berimbang untuk para perempuan pembuat kebijakan tampil dalam kegiatan-kegiatan utama program/inovasi, diharapkan akan merefleksikan semangat yang sama dalam implementasi program ATS, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk kembali ke sekolah dan berprestasi.

Pendokumentasian ini juga mencatat bahwa inovasi yang dilakukan mengintegrasikan beberapa komponen sebagai upaya untuk mengembangkan program yang inklusif disabilitas. Pelibatan perwakilan kelompok penyandang disabilitas misalnya dilakukan pada program Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan, dengan mencantumkan keterlibatannya dalam struktur kelembagaan inovasi. Sistem pendataan yang dikembangkan pun sudah mencakup anak dengan disabilitas. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan juga melakukan penguatan regulasi dengan SK Bupati untuk penambahan jumlah sekolah inklusif, termasuk instruksi untuk menerima ATS disabilitas sebagai siswa. Meskipun begitu, pendokumentasian ini juga menemukan bahwa upaya pendekatan ini belum terlihat di tiga kabupaten lainnya.

Upaya lain yang teridentifikasi telah dilakukan untuk memastikan inovasi yang dilakukan sensitif gender dan inklusi sosial adalah sistem pendataan dan pengelolaannya berdasarkan data terpilah, baik berdasarkan jenis kelamin, dan juga jenis disabilitas anak, yang akan memudahkan upaya mengidentifikasi kebutuhan mereka. Data terpilah gender sudah tersedia di semua inovasi di tiga kabupaten, dan menjadi perhatian khusus dalam inovasi Kelas Perahu karena anak perempuan yang “melaut” teridentifikasi memiliki kerentanan lebih besar menjadi ATS daripada anak laki-laki.

Terlepas dari semua upaya yang dilakukan, pendokumentasian ini juga mencatat perlunya penguatan aspek inklusif disabilitas dalam semua inovasi, karena sekalipun informasi disabilitas sudah tercakup dalam sistem pendataan di Brebes dan Pekalongan, kinerja pengembalian anak disabilitas tidak sekolah belum cukup kuat dalam impelementasinya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masih lemahnya sisi *supply* layanan pendidikan untuk anak disabilitas. Sementara itu, gerakan sekolah inklusi masih dalam tahap embrio di Pekalongan.

Regulasi sekolah inklusi sudah tersedia tetapi belum diikuti dengan perekrutan guru dan penyesuaian sarana prasarana sekolah yang nyaman bagi anak disabilitas. Dalam hal ini sekolah-sekolah inklusi yang baru tersebut belum memiliki guru yang kompeten untuk mengajar anak disabilitas. Demikian pula, penyemaian nilai kepada siswa bahwa anak dengan disabilitas juga memiliki hak belajar dan talenta yang unik, belum menjadi muatan penting dalam advokasi, sehingga anak dengan disabilitas masih malu atau takut karena rentan diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Dari sisi permintaan, kebanyakan anak disabilitas tidak sekolah belum pernah bersekolah sekalipun mereka sudah berumur remaja. Karenanya, dibutuhkan kekuatan psikologis yang besar bagi mereka untuk memulai langkah pertamanya ke sekolah. Senada dengan itu, hambatan lainnya adalah keadaan psikologis orangtua yang tidak yakin bahwa anak dengan disabilitas mampu belajar di sekolah. Faktor-faktor di atas perlu menjadi bagian penting dalam advokasi dan penyediaan layanan pendidikan bagi ATS dengan kebutuhan khusus di masa depan.

VI.2. Rekomendasi

Dari hasil dokumentasi studi inovasi penanganan dan pencegahan ATS, rekomendasi dapat diberikan kepada berbagai pihak untuk dimanfaatkan bagi berbagai tujuan. Rekomendasi untuk penguatan Strategi Nasional Penanganan (STRANAS) ATS:

1. Praktik baik strategi penanganan dan pencegahan ATS dapat memperkuat STRANAS untuk memberikan peta jalan tata kelola penanganan ATS di level kabupaten.
2. Perlunya penguatan kolaborasi penanganan ATS multipihak dengan pelibatan pemerintah kecamatan dan desa, serta memastikan pemahaman tugas dan fungsi antarlevel pemerintah.
3. Penekanan pada upaya penting penanganan ATS, yaitu pada sistem manajemen data ATS, termasuk data ATS penyandang disabilitas. Proses pengelolaan data pada saat pendataan (data awal), rekonfirmasi (*update* per tahun), dan *monitoring* ATS (*update* per semester) harus melibatkan pemerintah desa untuk memastikan akurasi data.
4. Karena proses pengembalian ATS ke bangku sekolah adalah hasil antara, disarankan agar penguatan *monitoring* ATS yang sudah kembali bersekolah terus dilakukan sampai anak tersebut menamatkan pendidikannya.
5. Perlunya penyajian sistem manajemen data ATS berbasis teknologi android sebagai upaya efektivitas, efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan analisis data.

Rekomendasi untuk empat kabupaten dukungan KOMPAK yang telah menjalankan inovasi pencegahan dan penanganan ATS:

1. Agar meningkatkan kolaborasi multisektor: melalui pelibatan yang lebih intensif dari kecamatan dan desa, serta memastikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dilakukan melalui refleksi dan inovasi yang berkelanjutan, agar gerakan pengembalian ATS selalu menyesuaikan dengan keragaman konteks lokal.
2. Diperlukan penyediaan pendanaan yang stabil dan berjangka panjang untuk mengelola penanganan ATS yang baik.
3. Agar terus mengoptimalkan sistem manajemen data ATS yang akurat berbasis teknologi, termasuk untuk data ATS penyandang disabilitas. Adopsi teknologi pendataan yang murah tapi efisien berbasis *web* dan android harus dapat diakses oleh publik dan multiaktor, termasuk sekolah dan PKBM penerima ATS yang kembali bersekolah.
4. Penguatan regulasi masih dibutuhkan untuk memastikan harmonisasi kebijakan dari kabupaten, kecamatan, dan desa untuk menjamin penyediaan pendanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

5. Agar dilakukan penguatan layanan sekolah inklusi melalui penguatan regulasi, perekrutan guru untuk mengajar anak dengan disabilitas, investasi pada sarana fisik sekolah inklusi yang ramah bagi disabilitas anak, serta advokasi luas baik pada anak sekolah, ATS, maupun orang tua.

Rekomendasi untuk kabupaten lain yang ingin menerapkan upaya inovasi pencegahan atau penanganan ATS:

1. Mendata inisiatif-inisiatif lokal pencegahan yang ada, untuk kemudian diperbesar skalanya dan dilembagakan di bawah kepemimpinan Bappeda dan Dinas Pendidikan. Dengan begitu dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten dan Dana Desa akan lebih mudah didapatkan.
2. Pemerintah kabupaten perlu menjalankan secara simultan strategi pencegahan dan strategi penanganan, sehingga anak rentan tidak menjadi ATS, dan ATS yang ada dapat secara optimal kembali ke dalam sistem persekolahan.
3. Inovasi pencegahan atau penanganan ATS wajib dimulai dengan menetapkan peta jalan (*roadmap*) program, sehingga pengorganisasian gerakan berjalan teratur dan cakupan penyebarannya masif.
4. Aspek tata kelola yang wajib tersedia dalam pengembangan upaya inovasi adalah hal-hal berikut ini.
 - a. Regulasi
 - b. Anggaran
 - c. Struktur kelembagaan
 - d. Mekanisme pelaksanaan
 - e. Sistem pendataan anak rentan putus sekolah dan ATS yang inklusif.
5. Untuk efisiensi waktu dan biaya, proses pendataan dan konfirmasi kemauan ATS bersekolah dapat didesain untuk terintegrasi dalam satu tahapan sensus pada awal inovasi. Hal ini akan mempermudah proses penargetan pengembalian ATS ke sistem persekolahan dan advokasi untuk penganggarannya.
6. Kabupaten-kabupaten yang hendak memulai inovasi lokal pencegahan atau penanganan ATS dapat menjadikan inovasi-inovasi lokal yang sudah dilakukan, termasuk yang didukung KOMPAK, sebagai subjek pembelajaran (*cross-learning*).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2020. "Indikator Pendidikan 1994–2019." Update Terakhir Desember 2020.
<https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2019.html>.
- Ekananto, Saefudin. 2014. "Analisis Kebutuhan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Musa Desa Cacabal Kidul, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo," Skripsi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
<https://core.ac.uk/download/pdf/33530266.pdf>
- FLS. 2017. "Flexible Learning Strategies." *UNESCO Bangkok* 3:40. May 19.
<https://bangkok.unesco.org/content/flexible-learning-strategies>
- Ford Foundation dan Prakarsa (2015). Multidimensional Poverty Index Indonesia 2012–2014: Calculation. https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/IndonesiaMPI_12_15_ExecSum.pdf
- Haskins, Ron. 2013. "Three Simple Rules Poor Teens Should Follow to Join the Middle Class." *Brookings*, March 13. <https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-should-follow-to-join-the-middle-class/>
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Strategi Nasional Penanganan ATS*. Jakarta: Bappenas.
- Pemerintah Kabupaten Brebes dan KOMPAK. 2020. *Pedoman dan Pendokumentasian Tata Kelola Gerakan Kembali Bersekolah*. Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
- Pemerintah Kabupaten Pangkep dan KOMPAK. 2020. *Panduan Replikasi Layanan Kelas Perahu*. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan KOMPAK. 2020. *Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah*. Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
- SUSENAS. 2017. Data Mikro. Jakarta: BPS.
- SUSENAS. 2019. Data Mikro. Jakarta: BPS.
- UNESCO. 2016. "263 million children and youth are out of school from primary to upper secondary." *UNESCO*, July 15. http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/263_million_children_and_youth_are_out_of_school_from_primar/
- UNESCO. 2016. "Leaving no one behind: How far on the way to universal primary and secondary education?" <https://en.unesco.org/gem-report/leaving-no-one-behind-how-far-way-universal-primary-and-secondary-education>
- Yarrow, Noah; Massod, Eema; Afkar, Rythia. 2020. *Estimated Impact of COVID019 on Learning and Earning in Indonesia: How to Turn the Tide*. Jakarta: World Bank.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Persentase Anak yang Bersekolah dan yang Tidak Bersekolah Berdasarkan Kelompok Umur

Tahun	Kelompok Umur	APS (%)	ATS (%)
1994	7-12 Tahun	94,06	5,94
1995	7-12 Tahun	93,94	6,06
1996	7-12 Tahun	94,43	5,57
1997	7-12 Tahun	95,37	4,63
1998	7-12 Tahun	95,06	4,94
1999	7-12 Tahun	95,34	4,66
2000	7-12 Tahun	95,50	4,50
2001	7-12 Tahun	95,61	4,39
2002	7-12 Tahun	96,10	3,90
2003	7-12 Tahun	96,42	3,58
2004	7-12 Tahun	96,77	3,23
2005	7-12 Tahun	97,14	2,86
2006	7-12 Tahun	97,39	2,61
2007	7-12 Tahun	97,60	2,40
2008	7-12 Tahun	97,83	2,17
2009	7-12 Tahun	97,95	2,05
2010	7-12 Tahun	97,97	2,03
2011	7-12 Tahun	97,53	2,47
2012	7-12 Tahun	97,94	2,06
2013	7-12 Tahun	98,34	1,66
2014	7-12 Tahun	98,83	1,17
2015	7-12 Tahun	98,57	1,43
2016	7-12 Tahun	98,98	1,02
2017	7-12 Tahun	99,08	0,92
2018	7-12 Tahun	99,11	0,89
2019	7-12 Tahun	99,17	0,83
2020	7-12 Tahun	99,04	0,96

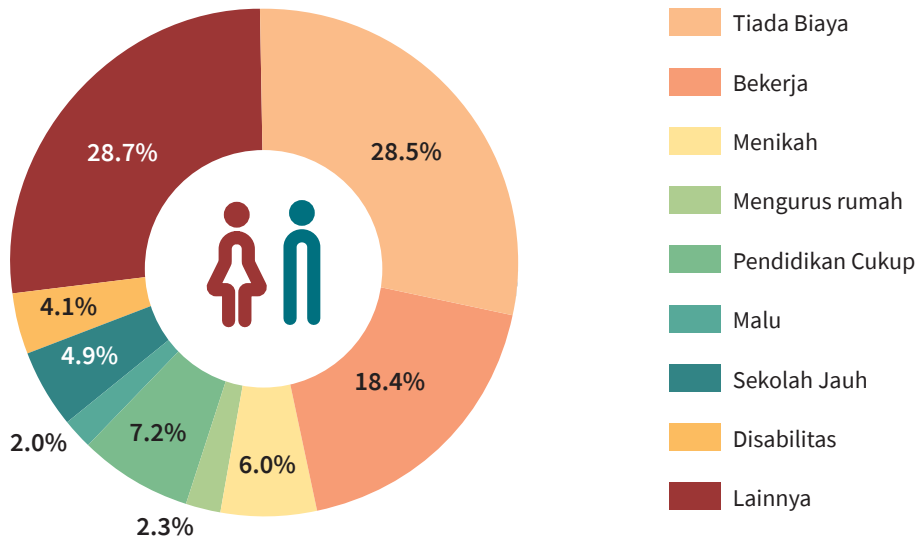
Tahun	Kelompok Umur	APS (%)	ATS (%)
1994	13–15 Tahun	72,39	27,61
1995	13–15 Tahun	73,20	26,80
1996	13–15 Tahun	75,84	24,16
1997	13–15 Tahun	77,51	22,49
1998	13–15 Tahun	77,16	22,84
1999	13–15 Tahun	79,04	20,96
2000	13–15 Tahun	79,58	20,42
2001	13–15 Tahun	79,35	20,65
2002	13–15 Tahun	79,21	20,79
2003	13–15 Tahun	81,01	18,99
2004	13–15 Tahun	83,49	16,51
2005	13–15 Tahun	84,02	15,98
2006	13–15 Tahun	84,08	15,92
2007	13–15 Tahun	84,26	15,74
2008	13–15 Tahun	84,41	15,59
2009	13–15 Tahun	85,43	14,57
2010	13–15 Tahun	86,11	13,89
2011	13–15 Tahun	87,79	12,21
2012	13–15 Tahun	89,61	10,39
2013	13–15 Tahun	90,62	9,38
2014	13–15 Tahun	94,32	5,68
2015	13–15 Tahun	94,25	5,75
2016	13–15 Tahun	94,79	5,21
2017	13–15 Tahun	94,98	5,02
2018	13–15 Tahun	95,23	4,77
2019	13–15 Tahun	95,43	4,57
2020	13–15 Tahun	95,28	4,72

Tahun	Kelompok Umur	APS (%)	ATS (%)
1994	16–18 Tahun	45,31	54,69
1995	16–18 Tahun	44,65	55,35
1996	16–18 Tahun	47,59	52,41
1997	16–18 Tahun	48,64	51,36
1998	16–18 Tahun	49,28	50,72
1999	16–18 Tahun	51,14	48,86
2000	16–18 Tahun	51,17	48,83
2001	16–18 Tahun	49,18	50,82
2002	16–18 Tahun	49,76	50,24
2003	16–18 Tahun	50,97	49,03
2004	16–18 Tahun	53,48	46,52
2005	16–18 Tahun	53,86	46,14
2006	16–18 Tahun	53,92	46,08
2007	16–18 Tahun	54,61	45,39
2008	16–18 Tahun	54,70	45,30
2009	16–18 Tahun	55,05	44,95
2010	16–18 Tahun	55,83	44,17
2011	16–18 Tahun	57,69	42,31
2012	16–18 Tahun	61,30	38,70
2013	16–18 Tahun	63,64	36,36
2014	16–18 Tahun	70,13	29,87
2015	16–18 Tahun	70,26	29,74
2016	16–18 Tahun	70,68	29,32
2017	16–18 Tahun	71,20	28,80
2018	16–18 Tahun	71,82	28,18
2019	16–18 Tahun	71,92	28,08
2020	16–18 Tahun	71,77	28,23

Sumber: Data Tahun 1994-2019 diestimasi dari BPS (2020) Indikator Pendidikan 1994-2019. <https://www.bps.go.id/statictable/2010/03/19/1525/indikator-pendidikan-1994-2019.html>.; Data Tahun 2020 dari prediksi Yarrow, Masood dan Afkar (2020)

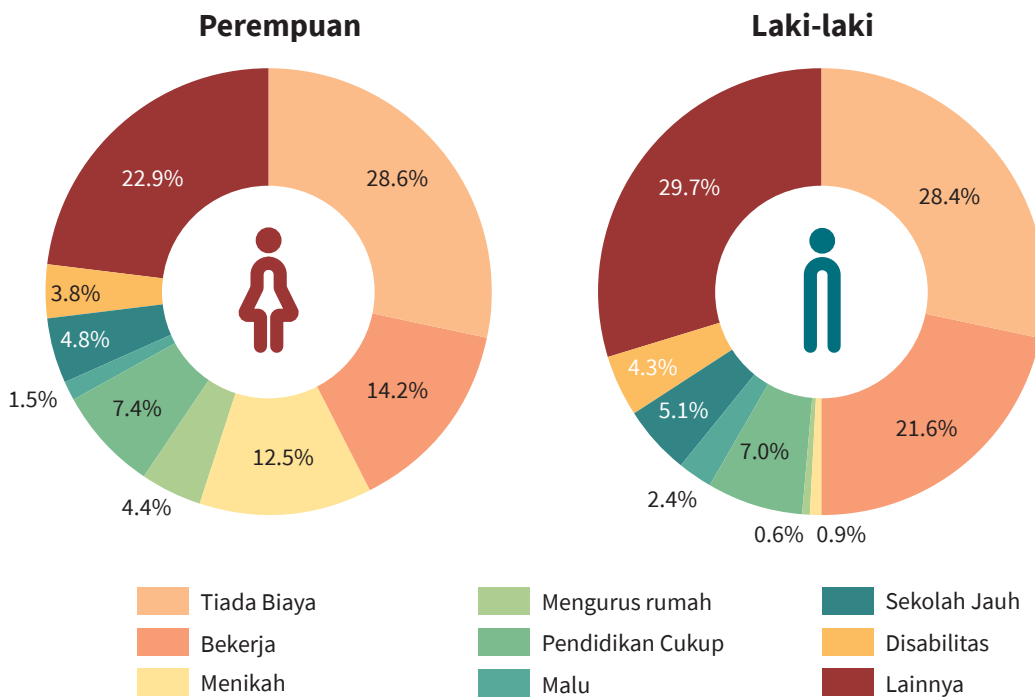
Lampiran 2.
Alasan Anak Menjadi ATS dan Perbedaan antar Jenis Kelamin

Lampiran 2.1.
Alasan mengapa anak Indonesia menjadi ATS



Sumber: Diolah dari Data SUSENAS (2017)

Lampiran 2.2.
Perbedaan alasan anak Indonesia menjadi ATS antar Gender



Sumber: Diolah dari Data SUSENAS (2017)

Lampiran 3. Capaian Penguatan Aspek Tata Kelola Penanganan ATS di Empat Kabupaten

Lampiran 3.1. Aspek Tata Kelola Penanganan ATS Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes

Aspek Tata Kelola	Sebelum dukungan KOMPAK	Dukungan KOMPAK
Regulasi dan Anggaran	Program Retrieval Kemendikbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 115 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 tahun 2. Perbup Nomor 25 Tahun 2017 tentang Data Tunggal 3. SK Bupati Nomor 420 / 5151 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembiayaan Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 Tahun; 4. Inisiatif Dinas: SE Dinpermades No. 142.41 Tahun 2019 tentang Penyaluran Dana Desa Tahap 3 (dana pendidikan minimal 4%, setara Rp15 juta per desa)
Kelembagaan & Mekanisme	Belum ada struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satker GKB kabupaten sampai desa 2. Ormas FMPP tercakup dalam Perbup Nomor 115 Tahun 2017; 3. Panduan pelaksanaan GKB (<i>draft</i>)
Pendataan ATS dan M&E	SIPBM (Dukungan UNICEF)	Rekonfirmasi data ATS yang akan kembali ke sekolah dengan aplikasi <i>ODK Collect & Aggregate</i> di 5 kecamatan: Bantarkawung, Paguyangan, Wanasari, Kersana dan Larangan
Kesetaraan Gender dan Inkusi Sosial	Sudah ada data terpilah gender	Ada data terpilah gender dan tambahan Informasi disabilitas tercakup dalam aplikasi <i>ODK Collect</i> .

Sumber: Data yang dipresentasikan dalam FGD dan Dokumen Inovasi, 2020

Lampiran 3.2.
Aspek Tata Kelola Penanganan ATS Gerakan KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan

Aspek Tata Kelola	Sebelum dukungan KOMPAK	Dukungan KOMPAK
Regulasi dan Anggaran	Program Retrieval Kemendikbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang WAJAR DIKDAS 12 Tahun 2. SK Bupati tentang tim gugus Kudu Sekolah 3. SE Bupati kepada Camat dan Desa untuk mendukung Gerakan Kudu Sekolah
Kelembagaan & Mekanisme	Belum ada struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satker KUDU SEKOLAH: Pentahelix dari unsur Pemkab, Pemkec, Pempdes, dunia usaha, perguruan tinggi dan ormas/masyarakat sipil 2. 151 dari 285 desa (53%) sudah mengukuhkan satker KUDU Sekolah di level desa 3. Panduan pelaksanaan mekanisme KUDU Sekolah
Pendataan ATS dan M&E	Aplikasi KUDU Sekolah	Pengayaan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen rekonfirmasi ATS yang akan kembali ke sekolah untuk akurasi pencairan dana bantuan setiap tahun. 2. Variabel status ABK pada instrumen pendataan, rekonfirmasi, dan monitoring anak yang sudah kembali ke sekolah. 3. Mengidentifikasi anak yang kembali keluar dari sekolah.
Kesetaraan Gender dan Inkusi Sosial	Ada data terpilah gender, terdapat 10 sekolah inklusif	SK Bupati 440/225 Tahun 2020 tentang Penunjukkan 42 Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, termasuk untuk mencakup layanan pendidikan dasar bagi anak disabilitas tidak sekolah (ADTS). Sudah 145 ADTS yang masuk ke sekolah inklusif.

Sumber: Data yang dipresentasikan dalam FGD dan Dokumen Inovasi, 2020

Lampiran 3.3
Aspek Tata Kelola Penanganan ATS SABER DO di Kabupaten Lombok Utara

Aspek Tata Kelola	Sebelum dukungan KOMPAK	Dukungan KOMPAK
Regulasi dan Anggaran	Program Retrieval Kemendikbud	Fasilitasi ranperbup SABER DO oleh KOMPAK pada 2017, tetapi belum sampai menjadi peraturan Bupati.
Kelembagaan & Mekanisme	Belum ada struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati No. 231/110.1/DIKPORA/2017 tentang Pembentukan Tim Sapu Bersih <i>Drop Out</i>. 2. SK Bupati No. 420/181/04/Dikpora/2017 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Program Pendataan Anak Putus Sekolah.
Pendataan ATS dan M&E	Pendataan oleh Pramuka	Sudah dilakukan pelatihan <i>ODK Collect</i> untuk pengumpulan data ATS secara elektronik, tetapi sistem pendataan belum terbangun utuh.
Kesetaraan Gender dan Inkusi Sosial	Sudah ada data terpilah jenis kelamin	Sudah ada data terpilah jenis kelamin.

Sumber: Data yang dipresentasikan dalam FGD dan Dokumen Inovasi, 2020

Lampiran 4.
Aspek Tata Kelola Pencegahan ATS Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep

Aspek Tata Kelola	Sebelum dukungan KOMPAK	Dukungan KOMPAK
Regulasi dan Anggaran	Ada 2 sekolah pilot Kelas Perahu tetapi tanpa payung regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2019 tentang Layanan Pendidikan Kelas Perahu. 2. SK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2019 tentang Tim Fasilitator Tim Kelas Perahu.
Kelembagaan & Mekanisme	Belum ada struktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai peta jalan pelaksanaan replikasi Kelas Perahu. 2. Inovasi pembelajaran dengan Lembar Kerja Siswa yang disederhanakan agar siswa dapat belajar mandiri. 3. Panduan Pelaksanaan Replikasi Kelas Perahu. 4. Replikasi Kelas Perahu untuk anak nelayan di 4 kecamatan lain di Pangkep (Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring). 5. TA 2019/20 sudah disiapkan 123 sekolah (SD dan SMP) untuk mengadopsi Kelas Perahu.
Pendataan Anak Rentan Putus Sekolah dan M&E	Sekolah (DAPODIK) karena Kelas Perahu adalah kelas khusus dalam sebuah sekolah formal	Model pendataan telah disepakati dalam “Panduan Replikasi Kelas Perahu” dan telah disepakati instrumen untuk <i>monitoring</i> bersama multisektor Kelas Perahu, termasuk untuk mendata siswa “melaut” (data terpilah).
Kesetaraan Gender dan Inkusi Sosial	Perhatian kepada siswa perempuan yang melaut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan yang mencakup pemilahan data berdasarkan gender. 2. Replikasi Kelas Perahu untuk anak pegunungan yang rentan putus sekolah karena bertani di jam sekolah.

Sumber: Data yang dipresentasikan dalam FGD dan Dokumen Inovasi, 2020

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

ISBN 978-623-6080-21-4 (PDF)



9 786236 080214